

ISBN: 978-979-3382-59-3

KAJIAN DAMPAK KEBIJAKAN DESENTRALISASI PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat



Krismi yati Tasrin
Putri Wulandari



Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
2012

ISBN: 978-979-3382-59-3

**Krismiyati Tasrin
Putri Wulandari**

**Kajian Dampak Kebijakan
Desentralisasi pada Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat**
Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat



PKP2A | LAN

**Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur |
Lembaga Administrasi Negara
2012**

Kajian Dampak Kebijakan Desentralisasi pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

(Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat)

Penulis : Krismiyati Tasrin
Putri Wulandari
Editor : Krismiyati Tasrin
Layout Sampul & Isi : Putri Wulandari

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Cetakan I, 2012

Hak Penerbitan pada:

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara

Alamat : Jl. Kiara Payung Km. 4,7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat
Telp/Fax : (022) 7790044 – 7790055
E-mail : admin@litbang.bandung.lan.go.id
Web : <http://litbang.bandung.lan.go.id/>

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Krismiyati Tasrin & Putri Wulandari

Kajian Dampak Kebijakan Desentralisasi pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara, 2012

xiii; 200 hlm; 182 x 257 mm

ISBN: 978-979-3382-59-3

I. Ekonomi Pembangunan

II. Judul

III. Krismiyati Tasrin

*Dilarang keras mengutip, menjiplak atau memfotocopy sebagian maupun seluruh
isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari
penerbit.*

ABSTRACT

After more than 10 years of decentralization policies implemented in Indonesia, it is considered essential to conduct an evaluation of the implementation of decentralization policy in increasing public welfare. The decentralization in this study is measured by three dimensions: fiscal, functional and personnel. These three variables are not made in a single composite index, but a separate index that subsequently made the correlation analysis with each variable of public welfare which includes variables of economy, infrastructure, education and health. By using panel data from 25 districts/cities in West Java Province in 2004-2010, the findings stated that in economics area, decentralization has not shown an effect, whether viewed from the fiscal decentralization variables, functional decentralization and decentralized personnel. It is shown by the absence of the significant coefficients of the variables. The determinant that significantly affect economic growth in the region is explained by the presence of control variables, namely the variable investment and labor where each variable has statistical significance by t test at $\alpha = 1\%$ and have a positive sign. Significance and magnitude of the influence of the variable investment and labor could be explained by the Neo Classical Production Function theory in which both the capital (investment) and labor are factors that determine productivity.

Furthermore, when viewed from the value of the coefficient of determination (R^2), amounting to 0.98258, indicating that model 1 is able to explain variation of regional economic growth by 98.26%, however, this effect does not come from decentralized variable, but it comes from the variable investment variable labor. In infrastructure area, personnel decentralization is the only variable that has an influence on changes in road infrastructure variables. However, the effect shown by the decentralization of personnel were negative variable. In education area, there are two variables that affect significantly on the accessibility of the public services in education: functional and personnel decentralization. However, both these variables have opposite effects. In the health area, it is found that there is no significant effect on changes in the ratio of the number of physicians per 1000 population. Furthermore, associated with the channel of the decentralization variables that can have an impact on improving people's welfare can be concluded that the variables of functional decentralization and personnel decentralization variable is channels that contribute to the welfare of society. However, the performance of the two channels remains to be improved for the future.

Keywords: Decentralization, Welfare, Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan desentralisasi telah menjadi *trend* manajemen pemerintahan selama beberapa dekade terakhir setelah sebelumnya kebijakan sentralisasi mendominasi manajemen pemerintahan di banyak negara di dunia. Secara umum, desentralisasi didefinisikan sebagai pemberian (*transfer*) wewenang dan tanggung jawab penanganan fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adapun alasan utama yang mendorong penggantian sistem sentralisasi dengan desentralisasi adalah karena pemerintah pusat dinilai gagal dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Hal ini karena dalam sistem sentralisasi, pemerintah memberlakukan penyeragaman (*uniformitas*) perlakuan (*treatment*) pada setiap daerah. Dan kebijakan “*one size fits all*” ini menyebabkan tidak terakomodasinya kekhasan yang dimiliki oleh setiap daerah, sehingga model kebijakan ini dipandang tidak mencerminkan kebutuhan lokal (Oates, 1972). Selain alasan tersebut, Bird dan Vaillancourt (1998) menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi menjadi kebijakan populer akhir-akhir ini karena model kebijakan ini menjanjikan terjadinya: efisiensi ekonomi, efektivitas biaya program, akuntabilitas, peningkatan mobilisasi sumber daya, berkurangnya tingkat kesenjangan (*disparitas*), peningkatan partisipasi politik, serta penguatan demokrasi dan stabilitas politik.

Melalui desentralisasi, pemerintah daerah lebih banyak berperan dalam pembangunan daerah karena mereka kini memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengembangan masyarakat di wilayah yurisdiksinya. Karena pemerintah lokal dinilai memiliki pengetahuan (*knowledge*) yang lebih baik tentang kebutuhan (*needs*) dan preferensi (*preferences*) warga masyarakatnya, maka proses pembangunan dalam model kebijakan desentralisasi seharusnya menjadi lebih efisien daripada model kebijakan sentralisasi dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Hal ini karena dalam kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yurisdiksinya. Dengan demikian, secara teoritis, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa model kebijakan desentralisasi seharusnya mampu membawa tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan bila dengan sistem sentralisasi (terpusat).

Di Indonesia, kebijakan desentralisasi sesungguhnya sudah dimulai sejak lama, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat.

Namun demikian, yang disebut sebagai “big bang” kebijakan desentralisasi di Indonesia memang baru dimulai sejak 1 Januari 2001, yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Sebelum tahun 2001, Indonesia memberlakukan model manajemen pemerintahan sentralisasi. Selama era sentralisasi ini, semua penggunaan anggaran untuk pemerintah daerah diatur oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya berperan sebagai “organizer” dengan otoritas kurang memadai dalam hal penganggaran dan pengambilan keputusan untuk daerahnya. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah telah menjadi “pemain utama” dalam pembangunan di daerah, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Hirawan (2007) bahwa selain untuk memenuhi tujuan demokrasi, hal penting lainnya dari pemberlakuan kebijakan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terminologi kesejahteraan masyarakat sendiri semestinya tidak didefinisikan dalam arti yang sempit, yang hanya sekedar menggunakan besaran PDRB (maupun PDRB per kapita) sebagai pendekatan (*proxy*), melainkan harus melibatkan beberapa indikator lain yang dinilai menjadi unsur-unsur pendukung konsep kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Istilah “sejahtera” memiliki pemahaman yang luas yang mencakup pemahaman sebagai suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya yang berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (www.menkokesra.go.id). Ditinjau dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian tentang kesejahteraan memiliki 2 (dua) dimensi yaitu *dimensi fisik* dan *dimensi psikologis*. Mengingat *dimensi psikologis*, sifatnya sangat subjektif dan proses pengukurannya tidak mudah, maka kebanyakan studi lebih sering menggunakan *dimensi fisik* sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, saat ini banyak berkembang pengukuran kesejahteraan dari sudut pandang *dimensi fisik*, misalnya *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia), *Physical Quality Life Index* (Indeks Mutu Hidup); *Basic Needs* (Kebutuhan Dasar), dan lain-lain.

Secara teoritis, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah harus lebih baik ketika kebijakan desentralisasi diimplementasikan mengingat kualitas informasi dan tingkat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di era desentralisasi lebih baik dibandingkan dari saat era

sentralisasi. Namun, meskipun desentralisasi tampaknya telah menjadi gaya manajemen pemerintah yang “menguntungkan” selama beberapa dekade terakhir, Bardhan dan Mookherjee (2005) menyebutkan bahwa pengaruh desentralisasi berbeda dari satu negara ke negara lain. Ini berarti bahwa desentralisasi tidak dapat menjamin bahwa itu akan membawa dampak positif karena hasil/dampaknya akan sangat tergantung pada kondisi setempat. Dengan kata lain, desentralisasi tidak selalu efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Elhiraika (2007) menyebutkan bahwa alasan di balik fenomena ini adalah karena *"lack of commensurate revenue assignments, inadequate access to financial markets, and lack of necessary administrative capacity"*.

Secara umum, terdapat 3 (tiga) aspek dari desentralisasi yaitu: *desentralisasi politik, desentralisasi administratif* dan *desentralisasi fiskal*. Saat ini, dilihat dari *aspek politik* dan *administratif*, tanggung jawab penanganan fungsi publik didistribusikan di antara beberapa tingkat pemerintahan: pusat, provinsi, kabupaten/kota. Di sini, sebenarnya "pemain utama" di era desentralisasi adalah tingkat pemerintahan yang terakhir yaitu kabupaten dan kota. Sementara, pemerintah provinsi berperan dalam hal koordinasi dan pengawasan lintas kabupaten/kota di bawah wilayahnya, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai regulator dan fasilitator. Selanjutnya, berkaitan dengan *aspek keuangan* atau *fiskal*, terdapat empat komponen utama dari desentralisasi fiskal: "(1) tugas pengeluaran (*expenditure assignment*), (2) tugas pendapatan (*revenue assignment*), (3) sistem dana perimbangan (*intergovernmental system*), dan (4) penganggaran dan monitoring keuangan (*budgeting and fiscal monitoring*)".

Selama ini, studi kuantitatif tentang desentralisasi lebih banyak menggunakan pendekatan fiskal atau keuangan sebagai pendekatan (*proxy*). Namun, mengingat derajat otonomi pemerintah daerah yang berbeda, maka tidaklah tepat bila untuk mengukur desentralisasi hanya dilihat dari *aspek fiskal* saja (Bird, dalam Hong, 2011). Zimmerman menyatakan bahwa desentralisasi seharusnya diukur tidak dari sebuah *single index* saja, tapi oleh *multiple indicator* yang saling berkaitan, yang meliputi 4 (empat) dimensi yaitu: *dimensi struktur, keuangan, fungsi, dan personnel* (ACIR, dalam Hong, 2011). Stephens (dalam Hong, 2001) juga mengajukan tiga dimensi yaitu *dimensi finansial, fungsi, dan personel* untuk mengukur derajat desentralisasi pemerintah daerah (*state government*) di Amerika Serikat.

Setelah lebih dari 10 tahun kebijakan desentralisasi diterapkan di Indonesia, dipandang penting untuk melakukan evaluasi dan penilaian prestasi desentralisasi kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pengertian yang lebih komprehensif. Oleh karenanya, penelitian ini akan mengukur bagaimana dampak

kebijakan desentralisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah pelaksanaan kebijakan desentralisasi secara signifikan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah?
- 2) Melalui saluran (*channel*) apa kebijakan desentralisasi tersebut memberikan pengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat?
- 3) Apa implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan dalam kerangka untuk mengefektifkan implementasi kebijakan desentralisasi yang selanjutnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

- **Di bidang ekonomi**, variabel desentralisasi belum menunjukkan pengaruhnya secara langsung, baik dilihat dari variabel *desentralisasi fiskal*, *desentralisasi fungsional* maupun *desentralisasi personnel*. Hal ini terlihat dari tidak adanya koefisien dari variabel desentralisasi yang signifikan mempengaruhi variabel ekonomi wilayah yang diwakili oleh variabel PDRB per kapita. Adapun determinan yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah dijelaskan oleh keberadaan variabel kontrol, yaitu *variabel investasi* maupun *variabel tenaga kerja* dimana masing-masing variabel memiliki signifikansi secara statistik dengan uji t pada $\alpha = 1\%$ dan memiliki tanda/sign positif. Ini berarti bahwa pada kondisi *ceteris paribus*, peningkatan rasio investasi terhadap PDRB dan peningkatan rasio tenaga kerja terhadap angkatan kerja sebesar 1 unit, masing-masing akan mengakibatkan peningkatan PDRB per kapita sebesar nilai koefisiennya sebagaimana terlihat pada model 1. Signifikansi dan besarnya pengaruh variabel investasi dan variabel tenaga kerja ini dapat dijelaskan oleh teori Fungsi Produksi Neo Klasik dimana baik modal (investasi) dan tenaga kerja merupakan faktor input yang menentukan produktifitas. Terkait dengan hal ini, meskipun tidak ada keterkaitan langsung antara ketiga variabel desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi, namun disinyalir terdapat keterkaitan tidak langsung variabel ini melalui saluran (*channel*) investasi, dimana tingginya investasi di daerah dijustifikasi sebagai bentuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menarik investasi. Selanjutnya, bila dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2), sebesar 0.98258, menunjukkan bahwa model 1 mampu menjelaskan variasi kemajuan pertumbuhan bidang ekonomi daerah sebesar 98,26%, namun demikian, pengaruh ini tidak

berasal dari variabel desentralisasi, tetapi berasal dari variabel investasi dan variabel tenaga kerja.

- **Di bidang infrastruktur**, hanya *variabel desentralisasi personil* yang memiliki pengaruh terhadap perubahan variabel infrastruktur jalan. Namun demikian, pengaruh yang ditunjukkan oleh variabel desentralisasi personil adalah negatif. Ini berarti bahwa bila terjadi peningkatan rasio PNS daerah terhadap PNS pusat sebesar satu unit maka akan terjadi penurunan rasio panjang jalan yang berkualitas baik sebesar nilai koefisiennya. Disinyalir, hal ini disebabkan oleh karena pasca pemberlakuan kebijakan desentralisasi, daerah-daerah mulai melakukan *recruitmen* PNS setiap tahunnya. Akibatnya jumlah PNS daerah semakin banyak dan menyebabkan pembengkakan kebutuhan anggaran rutin untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS daerah. Hal ini selanjutnya berimplikasi pada semakin menurunnya anggaran pembangunan infrastruktur jalan. Sementara itu, di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat tergolong tinggi, sehingga dengan minimnya pembangunan jalan yang dilakukan dalam kurun 6 tahun terakhir, maka rasio panjang jalan berkualitas baik per penduduk semakin kecil. Selanjutnya, bila dilihat dari koefisien determinasi (R^2) yang sangat kecil, yaitu sebesar 0.047097, maka dapat dikatakan bahwa model 2 hanya mampu menjelaskan variasi pertumbuhan infrastruktur jalan berkualitas baik sebesar 5%. Ini berarti bahwa sekitar 95% variasi pertumbuhan infrastruktur jalan berkualitas baik dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat di dalam model 2.
- **Di bidang Pendidikan**, terdapat dua variabel desentralisasi yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap aksesibilitas masyarakat pada bidang pendidikan tingkat menengah ke atas. Kedua variabel desentralisasi dimaksud adalah *variabel desentralisasi fungsional* dan *variabel desentralisasi personil*. Namun demikian, kedua variabel ini memiliki pengaruh yang berbeda yang ditunjukkan oleh koefisien variabel desentralisasi fungsional yang bertanda *negatif* dan koefisien variabel desentralisasi personil yang bertanda *positif*. Tanda negatif dari variabel desentralisasi fungsional ini menunjukkan bahwa bila terjadi peningkatan rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah secara nasional sebesar 1 unit akan menyebabkan terjadinya penurunan rasio jumlah sekolah SLTA per penduduk sebesar koefisiennya. Sementara itu, tanda positif dari variabel desentralisasi personil menunjukkan bahwa bila terjadi peningkatan rasio PNS daerah terhadap PNS pusat sebesar 1 unit akan mempengaruhi peningkatan rasio jumlah sekolah per

penduduk sebesar koefisiennya. Selain model 3, model 4 juga menjelaskan tentang pengaruh variabel desentralisasi di bidang pendidikan yang dilihat dari kualitas pendidikan tingkat menengah ke atas yang diwakili oleh variabel dependent berupa rasio murid dan guru. Di dalam model 4 ini, ditemukan bahwa tidak ada satupun variabel desentralisasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio murid dan guru tingkat SLTA. Hanya saja variabel tenaga kerja yang merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini, memiliki signifikansi pada $\alpha = 1\%$. Ketidak-signifikan variabel desentralisasi pada model ini disinyalir disebabkan oleh karena pemerintah daerah lebih banyak terfokus pada pengembangan pendidikan tingkat dasar (SD) dan pendidikan tingkat menengah pertama (SMP) yang merupakan bagian dari program wajib belajar 9 tahun, sehingga rekrutmen guru SD dan SLTA lebih banyak dibandingkan guru SLTA.

- ***Di bidang kesehatan***, ditemukan bahwa variabel desentralisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan rasio jumlah dokter per 1000 penduduk. Namun demikian, untuk model 6 dengan variabel dependent berupa rasio tempat tidur di Rumah Sakit terhadap, terlihat bahwa variabel desentralisasi personil signifikan dan bertanda positif. Ini berarti bahwa apabila terjadi peningkatan rasio PNS daerah terhadap PNS pusat sebesar 1 unit akan mempengaruhi peningkatan rasio jumlah tempat tidur di Rumah Sakit per 1.000.000 penduduk.
- Selanjutnya, terkait dengan saluran (*channel*) dari variabel desentralisasi yang mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat disimpulkan bahwa variabel desentralisasi fungsional dan variabel desentralisasi personil merupakan saluran (*channel*) yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun demikian kinerja kedua saluran (*channel*) inipun tetap harus ditingkatkan untuk kedepannya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan beberapa saran yang mengarahkan Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat untuk memaksimalkan peranannya dalam kerangka meningkatkan keberfungsian dari variabel desentralisasi, baik variabel desentralisasi fiskal, fungsional maupun personil. Beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

- Memaksimalkan peranan desentralisasi fiskal dengan mengoptimalkan kinerja instrumen-instrumen *revenue* yang mampu mendorong terjadinya peningkatan penerimaan daerah (*local revenue*), misalnya melalui optimalisasi pajak daerah yang

merupakan salah satu komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah.

- Mengoptimalkan peranan desentralisasi fungsional, melalui kebijakan pengalokasian anggaran yang disesuaikan dengan visi dan misi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik.
- Meningkatkan peranan desentralisasi personil melalui upaya-upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur teramat dalam kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penelitian yang berjudul *Kajian Dampak Kebijakan Desentralisasi pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat)* ini dapat selesai sesuai harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi apakah kebijakan desentralisasi berdampak positif ataukah negatif pada tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah khususnya kabupaten/kota di Jawa Barat, sedangkan manfaat yang dapat dipetik dari hasil kajian ini adalah untuk memberikan gambaran empiris mengenai dampak kebijakan desentralisasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Idealnya, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah harus lebih baik ketika kebijakan desentralisasi diimplementasikan mengingat kualitas informasi dan tingkat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di era desentralisasi lebih baik dibandingkan dari saat era sentralisasi, namun dalam prakteknya hal ini bisa saja tidak benar. Oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi dampak kebijakan desentralisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Melalui penelitian mandiri inilah, kami mencoba untuk menemukan jawabannya.

Pada kesempatan ini kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Drs. Gering Supriyadi, MM selaku Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara, Bapak Drs. Riyadi, M.Si. selaku Kepala Bidang Litbang Kajian Manajemen Kebijakan Pelayanan dan Otomasi Administrasi, Bapak Dr. H. Baban Sobandi, SE., M.Si. selaku Kepala Bidang Litbang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, Saudara Muhammad Afif Muttaqin selaku koordinator kegiatan dan semua pihak yang telah memfasilitasi dan turut serta membantu dari awal hingga selesainya kajian ini.

Kami menyadari bahwa hasil kajian ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami sangat mengharapkan kritik maupun saran guna perbaikan kajian ini. Akhirnya, semoga hasil kajian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan banyak manfaat bagi para pembacanya.

Sumedang, Agustus 2012
Tim Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
EXECUTIVE SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Sasaran Kajian	4
1.4 Hasil yang Diharapkan (<i>Output</i>)	4
1.5 Manfaat Hasil Kajian	4
1.6 Sistematika Pelaporan	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS DESENTRALISASI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	7
2.1 Konsep Desentralisasi	7
2.2 Indikator Desentralisasi	11
2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat	14
BAB II METODE PENELITIAN	26
3.1 Objek Penelitian	26
3.2 Variabel Penelitian	27
3.3 Metode Analisis	30
3.4 Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data	31
3.5 Operasionalisasi Variabel	32
3.6 Model Penelitian	33
3.7 Teknik Estimasi dan Evaluasi Model	35
BAB IV KONDISI UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT	37
4.1 Kondisi Geografis Provinsi Jawa Barat	37
4.2 Kondisi Demografis Kabupaten/Kota di Provinsi	

	Jawa Barat	38
4.3	Kondisi Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	41
4.4	Kondisi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	44
4.5	Kondisi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	47
4.6	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	51
4.7	Kondisi Aksesibilitas Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat terhadap Infrastruktur Kesehatan	55
4.8	Kondisi Aksesibilitas Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat terhadap Infrastruktur Pendidikan	58
BAB V	KORELASI ANTARA DERAJAT DESENTRALISASI DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	63
5.1	Hasil Estimasi	63
5.1.1	Estimasi Dengan Pendekatan PLS (<i>Common Effect</i>)	64
5.1.2	Estimasi Dengan Pendekatan <i>Fixed Effect</i>	64
5.1.3	Estimasi Dengan Pendekatan <i>Random Effect</i>	66
5.2	Hasil Analisis	67
5.2.1	Analisis Model 1	68
5.2.2	Analisis Model 2	68
5.2.3	Analisis Model 3	69
5.2.4	Analisis Model 4	70
5.2.5	Analisis Model 5	71
5.2.6	Analisis Model 6	71
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	72
	DAFTAR PUSTAKA	76
	LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan Kebijakan Desentralisasi di Indonesia	9
Tabel 2.2	Beberapa Pendekatan (<i>Proxy</i>) Kebijakan Desentralisasi dan Kesejahteraan Masyarakat pada Beberapa Studi Terdahulu	16
Tabel 3.1	Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi Objek Penelitian	26
Tabel 3.2	Variabel <i>Proxy</i> Desentralisasi	28
Tabel 3.3	Aspek dari Kesejahteraan Masyarakat dan Indikatornya	30
Tabel 3.4	Operasionalisasi Variabel	32
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010	40
Tabel 4.2	Total Penerimaan dan Laju Pertumbuhan Total Penerimaan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 (<i>Ribu Rupiah</i>)	42
Tabel 4.3	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2010	43
Tabel 4.4	Persentase Belanja Daerah terhadap Belanja Negara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2010	45
Tabel 4.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2010	49
Tabel 4.6	Persentase Jumlah PNS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat terhadap Jumlah PNS Indonesia Tahun 2004-2010	50
Tabel 4.7	PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 (Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 dalam <i>Ribu Rupiah</i>)	51
Tabel 4.8	Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010	53
Tabel 4.9	Rasio Investasi terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2010	54
Tabel 4.10	Rasio Jumlah Dokter per Seribu Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2010	55
Tabel 4.11	Rasio Total Penduduk terhadap Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa	

	Barat	57
Tabel 4.12	Rasio Total Penduduk terhadap Jumlah SLTA dan SMK Daerah Kota di Provinsi Jawa Barat	61
Tabel 4.13	Rasio Total Penduduk terhadap Jumlah SLTA dan SMK Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat	62
Tabel 5.1	Hasil Regresi PLS	64
Tabel 5.2	Hasil Regresi <i>Fixed Effect</i>	65
Tabel 5.3	Hasil Regresi <i>Random Effect</i>	66
Tabel 5.4	Kompilasi Hasil Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM	67
Tabel 5.5	Kompilasi Kesesuaian Model Yang Digunakan	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Jawa Barat	37
------------	-----------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2010	39
Grafik 4.2	Persentase Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2010	46
Grafik 4.3	Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Guru Setingkat SLTA Daerah Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2010	58
Grafik 4.4	Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Guru Setingkat SLTA Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2010	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Estimasi <i>Common Effect</i> (PLS)	79
Lampiran 2	Hasil Estimasi <i>Fixed Effect</i> (PLS)	80
Lampiran 3	Hasil Estimasi <i>Random Effect</i> (PLS)	81
Lampiran 4	Hasil Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kebijakan desentralisasi telah menjadi *trend* manajemen pemerintahan selama beberapa dekade terakhir setelah sebelumnya kebijakan sentralisasi mendominasi manajemen pemerintahan di banyak negara di dunia. Secara umum, desentralisasi didefinisikan sebagai pemberian (*transfer*) wewenang dan tanggung jawab penanganan fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adapun alasan utama yang mendorong penggantian sistem sentralisasi dengan desentralisasi adalah karena pemerintah pusat dinilai gagal dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Hal ini karena dalam sistem sentralisasi, pemerintah memberlakukan penyeragaman (*uniformitas*) perlakuan (*treatment*) pada setiap daerah. Dan kebijakan “*one size fits all*” ini menyebabkan tidak terakomodasinya kekhasan yang dimiliki oleh setiap daerah, sehingga model kebijakan ini dipandang tidak mencerminkan kebutuhan lokal (Oates, 1972). Selain alasan tersebut, Bird dan Vaillancourt (1998) menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi menjadi kebijakan populer akhir-akhir ini karena model kebijakan ini menjanjikan terjadinya: efisiensi ekonomi, efektivitas biaya program, akuntabilitas, peningkatan mobilisasi sumber daya, berkurangnya tingkat kesenjangan (*disparitas*), peningkatan partisipasi politik, serta penguatan demokrasi dan stabilitas politik.

Melalui desentralisasi, pemerintah daerah lebih banyak berperan dalam pembangunan karena mereka kini memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengembangan masyarakat di wilayah yurisdiksinya. Karena pemerintah lokal dinilai memiliki pengetahuan (*knowledge*) yang lebih baik tentang kebutuhan (*needs*) dan preferensi (*preferences*) warga masyarakatnya, maka proses pembangunan dalam model kebijakan desentralisasi seharusnya menjadi lebih efisien daripada model kebijakan sentralisasi dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Hal ini karena dalam kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, secara teoritis, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa model kebijakan desentralisasi seharusnya mampu membawa tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan bila dengan sistem sentralisasi (terpusat).

Di Indonesia, kebijakan desentralisasi sesungguhnya sudah dimulai sejak lama, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1945

tentang pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Namun demikian, yang disebut sebagai “big bang” kebijakan desentralisasi di Indonesia memang baru dimulai sejak 1 Januari 2001, yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah telah menjadi “pemain utama” dalam pembangunan di daerah, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Hirawan, S (2007) bahwa selain untuk memenuhi tujuan demokrasi, hal penting lainnya dari pemberlakuan kebijakan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terminologi kesejahteraan masyarakat sendiri semestinya tidak didefinisikan dalam arti yang sempit, yang hanya sekedar menggunakan besaran PDRB (maupun PDRB per kapita) sebagai pendekatan (*proxy*), melainkan harus melibatkan beberapa indikator lain yang dinilai menjadi unsur-unsur pendukung konsep kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, di dalam bagian penjelasan umum disebutkan bahwa “lapangan kesejahteraan sosial adalah sangat luas dan kompleks, yang mencakup antara lain, aspek-aspek pendidikan, kesehatan, agama, tenaga kerja, kesejahteraan sosial dan lain-lain”. Ditinjau dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian tentang kesejahteraan memiliki 2 (dua) dimensi yaitu *dimensi fisik* dan *dimensi psikologis*. Mengingat *dimensi psikologis*, sifatnya sangat subjektif dan proses pengukurannya tidak mudah, maka kebanyakan studi lebih sering menggunakan *dimensi fisik* sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, saat ini banyak berkembang pengukuran kesejahteraan dari sudut pandang *dimensi fisik*, misalnya *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia), *Physical Quality Life Index* (Indeks Mutu Hidup); *Basic Needs* (Kebutuhan Dasar), dan lain sebagainya.

Secara teoritis, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah harus lebih baik ketika kebijakan desentralisasi diimplementasikan mengingat kualitas informasi dan tingkat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di era desentralisasi lebih baik dibandingkan dari saat era sentralisasi. Namun, meskipun desentralisasi tampaknya telah menjadi gaya manajemen pemerintah yang “menguntungkan” selama beberapa dekade terakhir, Bardhan dan Mookherjee (2005) menyebutkan bahwa pengaruh desentralisasi berbeda dari satu negara ke negara lain. Ini berarti bahwa kebijakan desentralisasi tidak dapat menjamin akan selalu membawa pengaruh positif karena hasil/pengaruhnya akan sangat tergantung pada kondisi setempat. Dengan kata lain, desentralisasi tidak selalu efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Elhiraika (2007) menyebutkan bahwa alasan di balik fenomena ini adalah karena “*lack of commensurate*

revenue assignments, inadequate access to financial markets, and lack of necessary administrative capacity".

Secara umum, terdapat 3 (tiga) aspek dari desentralisasi yaitu: *desentralisasi politik, desentralisasi administratif dan desentralisasi fiskal*. Saat ini, dilihat dari *aspek politik dan administratif*, tanggung jawab penanganan fungsi publik didistribusikan di antara beberapa tingkat pemerintahan: pusat, provinsi, kabupaten/kota. Di sini, sebenarnya "pemain utama" di era desentralisasi adalah tingkat pemerintahan kabupaten dan kota. Sementara, pemerintah provinsi berperan dalam hal koordinasi dan pengawasan lintas kabupaten/kota di bawah wilayahnya, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai regulator dan fasilitator. Selanjutnya, berkaitan dengan *aspek keuangan atau fiskal*, terdapat 4 (empat) komponen utama dari desentralisasi fiskal: "(1) tugas pengeluaran (*expenditure assignment*), (2) tugas pendapatan (*revenue assignment*), (3) sistem dana perimbangan (*intergovernmental system*), dan (4) penganggaran dan monitoring keuangan (*budgeting and fiscal monitoring*)".

Selama ini, studi kuantitatif tentang desentralisasi lebih banyak menggunakan pendekatan fiskal atau keuangan sebagai pendekatan (*proxy*). Namun, mengingat derajat otonomi pemerintah daerah yang berbeda, maka tidaklah tepat bila untuk mengukur desentralisasi hanya dilihat dari *aspek fiskal* saja (Bird, dalam Hong, 2011). Zimmerman menyatakan bahwa desentralisasi seharusnya diukur tidak dari sebuah *single index* saja, tapi oleh *multiple indicator* yang saling berkaitan, yang meliputi 4 (empat) dimensi yaitu: *dimensi struktur, keuangan, fungsi, dan personnel* (ACIR, dalam Hong, 2011). Stephens (dalam Hong, 2011) juga mengajukan tiga dimensi yaitu *dimensi finansial, fungsi, dan personil* untuk mengukur derajat desentralisasi pemerintah daerah (*state government*) di Amerika Serikat.

Setelah lebih dari 10 tahun kebijakan desentralisasi diterapkan di Indonesia, dipandang penting untuk melakukan evaluasi dan penilaian prestasi desentralisasi kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pengertian yang lebih komprehensif. Oleh karenanya, penelitian ini akan mengukur bagaimana dampak kebijakan desentralisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Secara teori, desentralisasi memang dipandang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, namun dalam prakteknya hal ini bisa saja tidak benar. Oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi dampak kebijakan desentralisasi terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat di daerah. Selanjutnya, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah pelaksanaan kebijakan desentralisasi secara signifikan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah?
- 2) Melalui saluran (*channel*) apa kebijakan desentralisasi tersebut memberikan pengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat?
- 3) Apa implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan dalam kerangka untuk mengefektifkan implementasi kebijakan desentralisasi yang selanjutnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN KAJIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi apakah kebijakan desentralisasi berdampak positif atau negatif pada tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah. Fungsi matematis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$$KM = f(D)$$

di mana:

KM = Kesejahteraan Masyarakat di daerah

D = Kebijakan Desentralisasi

1.4 HASIL YANG DIHARAPKAN (*OUTPUT*)

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah berupa hasil evaluasi mengenai dampak kebijakan desentralisasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan rekomendasi kebijakan.

1.5 MANFAAT HASIL KAJIAN

Adapun manfaat dari hasil kajian ini adalah untuk memberikan gambaran empiris mengenai dampak kebijakan desentralisasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

1.6 SISTEMATIKA PELAPORAN

Selanjutnya, sistematika pelaporan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang melatar-belakangi munculnya permasalahan penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran kajian, hasil yang diharapkan, manfaat hasil kajian, dan sistematika pelaporan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS DESENTRALISASI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Bab ini menjelaskan tentang berbagai kerangka teori yang digunakan dalam kajian ini, yaitu teori-teori yang dinilai relevan sehingga mendukung bagi tercapainya penelitian yang ilmiah. Adapun dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang desentralisasi, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan ketimpangan wilayah (*regional disparity*).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini. Metode penelitian dimaksud meliputi beberapa hal yaitu objek penelitian, variabel penelitian, metode analisis, jenis data, teknik pengumpulan data, sumber data, operasionalisasi variabel, model penelitian, serta teknik estimasi dan evaluasi model.

BAB IV : KONDISI UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang mencakup kondisi geografis, demografis, keuangan daerah, angkatan kerja, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

BAB V : KORELASI ANTARA DERAJAT DESENTRALISASI DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Bab ini menjelaskan tentang hasil estimasi dan analisis mengenai korelasi antara derajat desentralisasi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran tindak lanjut dari kajian ini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS DESENTRALISASI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Bab ini berisi tentang kerangka teoritis yang digunakan dalam kajian ini, yaitu teori-teori yang dinilai relevan sehingga mendukung bagi tercapainya kajian yang ilmiah. Adapun dasar teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori tentang desentralisasi, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan ketimpangan wilayah (*regional disparity*). Selain itu, agar secara empiris dapat diketahui hubungan keterkaitan antara hasil penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, maka dalam pembahasan bab ini juga akan dilengkapi dengan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan sekaligus komparasi.

2.1 KONSEP DESENTRALISASI

Selama beberapa dekade terakhir, kecenderungan yang jelas telah muncul di banyak negara adalah terjadinya peralihan manajemen pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Desentralisasi sendiri didefinisikan sebagai pelimpahan kewenangan (transfer of authority) dalam penanganan fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut, Ebel dan Yilmaz dalam Altito (2010), desentralisasi terdiri dari beberapa bentuk, yaitu: *devolusi*, *dekonsentrasi* dan *delegasi*. **Devolusi** didefinisikan sebagai penyerahan kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan, mengelola keuangan dan manajemen kepada lembaga-lembaga independen atau kuasi-otonom di daerah. Devolusi biasanya mencakup pelimpahan tanggungjawab dan wewenang penyelenggaraan pelayanan publik kepada pemerintahan daerah otonom yang memiliki lembaga legislatif (DPRD) yang berwenang memilih Kepala Daerahnya, memiliki kewenangan untuk memutuskan kebijakan investasi. Sesungguhnya devolusi inilah yang dalam konteks Indonesia selalu disebut dengan desentralisasi yang menghasilkan daerah otonom Kabupaten, Kota, dan Provinsi (dengan kewenangan otonomi yang relatif terbatas). Sementara, **dekonsentrasi** adalah redistribusi atau pelimpahan

kewenangan dan manajemen kepada berbagai tingkatan kelembagaan pemerintahan pusat. Wujud dekonsentrasi ini ada pada Daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi Pusat di daerah, atau karena kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah. Sedangkan *delegasi* didefinisikan sebagai pemberian sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengambilan keputusan dan fungsi-fungsi administrasi publik dari pemerintah kepada lembaga-lembaga independen atau lembaga-lembaga semi otonom yang sepenuhnya berada di luar kelembagaan pemerintahan.

Secara umum, kebijakan pemberian otonomi kepada daerah merupakan kebijakan tipikal yang banyak terjadi di berbagai negara kesatuan seperti Indonesia. Hal ini didasarkan atas beberapa justifikasi. *Pertama*, dalam konteks negara kesatuan, pemberian otonomi sesungguhnya merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagai satu kesatuan bangsa, bukan sebagai kedaulatan berbagai kelompok masyarakat bangsa yang berdiri sendiri-sendiri. *Kedua*, adanya kenyataan bahwa pemerintah pusat tidak akan cukup mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang sangat beragam dan rentang geografis yang sangat jauh. Atas dasar hal-hal tersebutlah, selanjutnya, pemerintah memberikan kewenangan otonomi kepada daerah agar daerah dapat memenuhi kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat secara lebih efektif dan efisien. Keefektifan dan keefisienan ini dikarenakan pemerintah daerah dinilai lebih memahami kebutuhan (*needs*) dan preferensi (*preference*) dari masyarakat yang ada di wilayah yurisdiksinya.

Pada prinsipnya, penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan daya saing daerah dalam sistem NKRI. Otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, yang berarti mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah (*regional disparity*). Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah pusat demi tegaknya NKRI.

Kebijakan desentralisasi di Indonesia telah berkembang sejak lama dan penyelenggaraannya mengalami perubahan dari masa ke masa. Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) periodisasi perkembangan kebijakan desentralisasi di Indonesia, meliputi: 1) *Masa Orde Lama (1945-1965)* yang ditandai dengan rangkaian produk hukum tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1945, Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, Undang-Undang No. 1 Tahun 1957,

Undang-Undang No. 18 Tahun 1965; 2) *Masa Orde Baru (1974-1998)*, yang ditandai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah; dan 3) *Masa Orde Reformasi (1999-sekarang)*, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang berlaku hingga sekarang. Secara umum, gambaran praktek penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berdasarkan perkembangan kebijakan yang ada dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Perkembangan Kebijakan Desentralisasi di Indonesia

Periode/ Masa	Kebijakan Desentralisasi	Asas Otonomi Daerah	Bentuk Daerah Otonom
Masa Orde Lama (1945-1965)	UU No. 1 tahun 1945	Otonomi Luas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kabupaten ▪ Karisidenan ▪ Daerah Istimewa
	UU No. 22 Tahun 1948	Otonomi Luas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provinsi dan Kabupaten (kota besar) ▪ Desa (kota Kecil, negara, marga) ▪ Daerah istimewa
	UU No. 1 Tahun 1957	Otonomi Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daerah swatantra ▪ Daerah istimewa
	UU No. 18 Tahun 1965	Otonomi Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Propinsi atau Kotaraya (Daerah Tingkat I) ▪ Kabupaten/Kotamadya (Daerah Tingkat II) ▪ Kecamatan/Kotapraja (Daerah Tingkat III)
Masa Orde Baru (1974-1998)	UU No. 5 Tahun 1974	Otonomi nyata dan bertanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daerah Tingkat I ▪ Daerah Tingkat II
Masa Orde Reformasi (1999-sekarang)	UU No. 22 Tahun 1999	Otonomi Luas, nyata dan bertanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daerah Propinsi ▪ Daerah Kabupaten
	UU No. 32 Tahun 2004	Otonomi Luas, nyata dan bertanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintahan daerah provinsi ▪ Pemerintahan daerah kabupaten/kota ▪ Pemerintahan desa

Sumber: Diolah dari buku "Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia" (Siswanto Sunarno, 2006)

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia saat ini didasarkan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini mengatur prinsip otonomi daerah yang bersifat *seluas-luasnya*, *nyata* dan *bertanggungjawab*. Otonomi *seluas-luasnya*, berarti daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan selain yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam UU 32/2004. Dalam hal ini, daerah diberi kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Otonomi *nyata*, berarti bahwa pengelolaan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Sementara otonomi yang *bertanggungjawab*, artinya bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Merunut dari sejarah panjang pemberlakuan kebijakan desentralisasi di Indonesia sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.1, selama ini yang dikenal dengan istilah “big bang” Desentralisasi adalah sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 pada tanggal 1 Januari 2001. Sejak itu manajemen pemerintahan di Indonesia telah berubah dari sistem terpusat ke desentralisasi berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004. Karena peraturan desentralisasi dilaksanakan, pemerintah daerah telah menjadi pemain dalam pembangunan daerah, termasuk dalam memberikan pelayanan publik di daerah seperti dikatakan Hirawan (2007) bahwa selain memenuhi tujuan demokratisasi, tujuan penting lainnya dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui memberikan yang lebih baik pelayanan publik lokal.

Kebijakan desentralisasi fiskal telah membawa perubahan mendasar dalam sistem manajemen keuangan (*fiskal*) di daerah. Hal ini terlihat dari besarnya sumber pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk transfer atau dana perimbangan yang meningkat dari tahun ke tahun. Konsekuensi lain dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah bahwa pemerintah daerah kini diberi wewenang untuk menarik pajak dan retribusi dan juga memperoleh bagi hasil baik dari pajak maupun dari sumber daya alam.

Selain itu, kebijakan desentralisasi telah meningkatkan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber yang sesuai dana untuk sektor prioritas dalam yurisdiksi mereka.

2.2 INDIKATOR DESENTRALISASI

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa desentralisasi terdiri dari tiga aspek yang saling berkaitan satu sama lain: *politik*, *administratif* dan *fiskal*. Di antara ketiganya, desentralisasi fiskal lah yang paling banyak dibahas pada berbagai studi kuantitatif. Dalam berbagai studi terkait, untuk mengukur desentralisasi fiskal di suatu daerah, variabel yang seringkali digunakan adalah pengeluaran (*expenditure*) dan penerimaan (*revenue*). Ebel dan Yilmaz dalam Siagian, Altito R. (2010) menyatakan bahwa terdapat variasi dalam pemilihan indikator untuk mengukur derajat desentralisasi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Artinya, meskipun sama-sama menggunakan variabel pengeluaran dan penerimaan pemerintah, yang menjadi pembeda adalah variabel ukuran (*size variables*) yang digunakan oleh peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Di sini terdapat tiga variabel ukuran (*size variabel*) yang umum digunakan untuk menentukan besaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan GDP.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2, beberapa studi terdahulu menggunakan variabel-variabel pengukuran derajat desentralisasi fiskal yang sangat bervariasi. Dari sisi penerimaan (*revenue*), beberapa pendekatan (*proxy*) yang digunakan misalnya variabel share PAD (*own-source revenue*) terhadap total pendapatan daerah dan share dana transfer terhadap total pendapatan (Elhiraika, 2007); persentase penerimaan pajak daerah dibagi dengan total penerimaan pajak nasional (Hong, 2011); *Share* PAD terhadap total penerimaan daerah, *share* dana bagi hasil (*revenue sharing*) terhadap total penerimaan daerah, dan share dana perimbangan terhadap total penerimaan daerah (Altito (2010), Tasrin (2011), Jin Jin dan Heng-fu, Zou (2000), Slinko, Irina (2002); rasio penerimaan pemerintah daerah terhadap penerimaan total pemerintah pusat, rasio penerimaan pemerintah daerah dikurangi subsidi terhadap penerimaan otal pemerintah (Gery, M. Woller dan Kerk Phillips, 1998).

Sementara itu, beberapa variabel dari sisi pengeluaran (*expenditure*) yang digunakan untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal pada beberapa kajian sebelumnya, antara lain: persentase alokasi APBD (*budget allocation*) untuk sektor pendidikan terhadap total pengeluaran daerah (Tasrin, 2011); rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran nasional dikurangi pengeluaran sosial dan

pertahanan (Gery, M. Woller dan Kerk Phillips, 1998); rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran nasional (Jin Jin dan Heng-fu, Zou (2000); Slinko, Irina (2002).

Sebenarnya, penggunaan indikator pendapatan (*revenue*) dan pengeluaran (*expenditure*) sebagai *proxy* untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal mengandung kelemahan. Hal ini dinyatakan oleh Ebel dan Yilmaz (2002) serta Slinko (dalam Siagian, Altito R. (2010). Penjelasan mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

The problem with the expenditure decentralization is that local government usually does not have real degree of autonomy but act on behalf of the regional and federal government. We also have problems with the revenue side estimation of fiscal decentralization since those also could be not the consequence of municipal ability to rise and assign taxes, but the consequence of the revenue-sharing policy of regional government.

Namun demikian, dalam penelitian ini, pendekatan dari sisi penerimaan (*revenue*) masih akan dijadikan sebagai variabel *proxy* untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal. Adapun variabel yang akan digunakan adalah share Penerimaan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, sebagaimana digunakan dalam penelitian Jin Jin dan Heng-fu, Zou (2000), Slinko (2002); Elhiraika (2007); Altito (2010), Tasrin (2011). Penggunaan variabel ini didasarkan atas justifikasi bahwa PAD adalah alat ukur kemandirian daerah. Semakin tinggi share PAD terhadap total penerimaan daerah berarti semakin besar kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pembangunan di daerahnya. Di sini, PAD mencerminkan *local taxing power* yang “cukup” sebagai *necessary condition* bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas (Altito, 2010). Hal ini karena pajak daerah (*tax*) dan retribusi daerah merupakan sumber utama dalam PAD.

Selanjutnya, selain aspek penerimaan (*revenue*), kajian ini juga akan menggunakan variabel dari aspek pengeluaran (*expenditure*) yaitu rasio pengeluaran daerah terhadap pengeluaran nasional. Variabel ini juga digunakan oleh Hong (2011) dalam penelitiannya yang mengambil studi kasus Korea Selatan, hanya saja Hong menempatkan variabel ini bukan sebagai bagian dari variabel desentralisasi fiskal melainkan merupakan penjelasan dari variabel fungsional.

Adanya kelemahan penggunaan variabel desentralisasi fiskal sebagai satu-satunya variabel yang digunakan untuk mengukur derajat desentralisasi, sedikit banyak telah dijawab oleh Hong (2011) melalui penggunaan beberapa variabel lain diluar variabel desentralisasi fiskal. Hal ini mengacu pada pernyataan Zimmerman yang berpendapat bahwa

definisi desentralisasi harus diukur bukan dengan indeks tunggal, tetapi oleh beberapa indeks yang saling terkait. Di sini dan Zimmerman dalam Hong (2011) mengklasifikasikan desentralisasi menjadi empat dimensi *struktur, fungsi, keuangan, dan personil*. Mengacu pada konsep desentralisasi Zimmerman ini, penelitian Hong (2011), meniadakan aspek struktural dan menggunakan tiga dimensi lainnya yaitu: *dimensi fungsi, keuangan dan personil*.

Dalam kerangka penelitian yang lebih komprehensif, penelitian ini akan mengadopsi pendekatan yang dilakukan dalam penelitian Hong (2011), yang selain menggunakan dimensi desentralisasi fiskal juga menggunakan dimensi desentralisasi fungsional dan desentralisasi personil. Adapun variabel yang menjadi *proxy* dari dimensi fungsional adalah sama dengan variabel desentralisasi fiskal dari aspek pengeluaran (*expenditure*) yaitu rasio pengeluaran daerah terhadap total pengeluaran nasional. Hal ini didasarkan atas justifikasi bahwa esensi dari desentralisasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah berupa penyerahan kewenangan (*transfer of authority*) penangan fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini berarti, pasca implementasi kebijakan desentralisasi, daerah memiliki kewenangan-kewenangan untuk melakukan pembangunan di daerahnya. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, saat ini kewenangan pemerintah pusat meliputi enam bidang yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama, sementara kewenangan pemerintah daerah meliputi: (1) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (2) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; (3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (4) penyediaan sarana dan prasarana umum; (5) penanganan bidang kesehatan; (6) penyelenggaraan pendidikan; (7) penanggulangan masalah sosial; (8) pelayanan bidang ketenagakerjaan; (9) fasilitas pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah; (10) pengendalian lingkungan hidup; (11) pelayanan pertanahan; (12) pelayanan kependudukan dan catatan sipil; (13) pelayanan administrasi umum pemerintahan; (14) pelayanan administrasi penanaman modal; (15) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; (16) urusan wajib lainnya yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan.

Selanjutnya, daerah harus menyusun pengeluaran pemerintah dalam rangka membiayai berbagai aktivitas atau fungsi yang menjadi tanggungjawabnya. Di sini, dalam mengalokasikan pembelanjaan atas sumber-sumber penerimaannya terkait dengan fungsi desentralisasi, daerah memiliki kebijakan penuh untuk menentukan besaran dan sektor apa yang akan dibelanjakan (kecuali transfer DAK yang digunakan untuk kebutuhan khusus) yang dituangkan dalam APBD. APBD pada dasarnya

memuat rancangan keuangan yang diperoleh dan dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum selama satu tahun anggaran. Rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran nasional inilah yang selanjutnya dijadikan proxy dari dimensi desentralisasi fiskal (aspek pengeluaran) atau oleh Hong (2011) disebut sebagai bagian dari dimensi desentralisasi fungsional.

Selanjutnya, terkait dengan dimensi desentralisasi personil, Hong (2011), selanjutnya juga akan digunakan dalam kajian ini, menggunakan pendekatan variabel rasio jumlah PNS daerah terhadap PNS pusat. Adapun alasan penggunaan variabel ini adalah bahwa adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan berimplikasi pada kebutuhan pelimpahan sumber daya baik keuangan, personil, maupun sarana dan prasarana.

2.3 INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Sama halnya dengan istilah desentralisasi, pendefinisian aspek kesejahteraan masyarakat juga sangat beragam. Pada pemahaman sempit, kesejahteraan masyarakat sering kali didekati dengan menggunakan *proxy* PDB per kapita. Namun pada beberapa tahun terakhir ini, penggunaan PDB per kapita (dan juga turunannya) sebagai satuan ukuran yang kerap digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, telah mengundang perdebatan di berbagai kalangan. Hal ini karena seringkali terjadi tidak sinkron antara angka dan realitas “kesejahteraan” yang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang selanjutnya menyebabkan Presiden Perancis Nicholas Sarkozy, pada Februari 2008, - yang tidak puas dengan kondisi info statistik mengenai perekonomian dan masyarakat saat itu- meminta Joseph Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi untuk membentuk Komisi bernama Komisi Pengukuran Kinerja Ekonomi dan Kemajuan Sosial (CMEPSP). Pembuatan komisi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi keterbatasan PDB sebagai indikator kinerja ekonomi dan kemajuan sosial.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menjelaskan tentang kesejahteraan masyarakat. Trend terbaru menafsirkan bahwa konsep kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dalam arti luas dimaknai sebagai suatu kondisi dimana tercapai kualitas hidup yang baik atau kecukupan kebutuhan dasar manusia. Liu dalam Hong (2011) adalah contoh kasus yang menggunakan pendekatan kualitas hidup untuk mengukur tingkat pembangunan daerah. Di sini, Liu membangun lima

dimensi kualitas hidup seperti ekonomi, politik, lingkungan, kesehatan dan pendidikan, dan sosial, dan kemudian memilih 123 indikator untuk lima dimensi tersebut.

Selanjutnya, jika kita menafsirkan konsep kesejahteraan masyarakat sebagai konsep kualitas hidup maka penjelasan mengenai konsep ini harus diartikan sebagai konsep yang sangat luas yang mencakup dimensi kepuasan psikologis, kebahagiaan, dan kesehatan. Senada dengan hal tersebut, penelitian Hong (2011) juga mencoba mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah dari sudut pandang kualitas hidup melalui 8 indikator, yang terbagi atas 4 dimensi yaitu: ekonomi regional, infratraktur, sumber daya manusia, dan kesehatan dan kesejahteraan.

Beberapa kajian penelitian lain cukup banyak yang mendefinisikan kesejahteraan masyarakat sebagai suatu kondisi terpenuhinya pelayanan publik dasar yang meliputi pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya dalam pendefinsian kesejahteraan masyarakat dalam kajian ini akan mengikuti pendefinsian menurut Hong (2011) yang tidak hanya menggunakan indikator PDRB per kapita sebagai satu-satunya indikator yang menjelaskan tentang kesejahteraan masyarakat, namun juga akan meliputi beberapa dimensi terkait dengan pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan dan aparatur. Hal inilah yang menjadikan *positioning* kajian ini dalam konstelasi kajian-kajian sejenis yang pernah dilakukan, sebagai salah satu kajian yang menggunakan pendekatan yang komprehensif.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini. Metode penelitian dimaksud meliputi beberapa hal yaitu objek penelitian, variabel penelitian, metode analisis, jenis data, teknik pengumpulan data, sumber data, operasionalisasi variabel, model penelitian, serta teknik estimasi dan evaluasi model.

3.1 OBJEK PENELITIAN

Dalam kajian ini, yang menjadi objek penelitian sekaligus populasi adalah seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 26 daerah. Adapun daerah-daerah tersebut meliputi 17 kabupaten dan 9 kota yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi Objek Penelitian

No.	Daerah Kabupaten	No.	Daerah Kota
1.	Kab. Bogor	1.	Kota Bogor
2.	Kab. Sukabumi	2.	Kota Sukabumi
3.	Kab. Cianjur	3.	Kota Bandung
4.	Kab. Bandung	4.	Kota Cirebon
5.	Kab. Garut	5.	Kota Bekasi
6.	Kab. Tasikmalaya	6.	Kota Depok
7.	Kab. Ciamis	7.	Kota Cimahi
8.	Kab. Kuningan	8.	Kota Tasikmalaya
9.	Kab. Cirebon	9.	Kota Banjar
10.	Kab. Majalengka		
11.	Kab. Sumedang		
12.	Kab. Indramayu		
13.	Kab. Subang		
14.	Kab. Purwakarta		
15.	Kab. Karawang		
16.	Kab. Bekasi		

17.	Kab. Bandung Barat
-----	--------------------

Namun demikian, Kabupaten Bandung Barat yang merupakan daerah yang dimekarkan pada tanggal 2 Januari 2007 dalam analisisnya akan digabungkan dengan Kabupaten Bandung yang merupakan kabupaten induknya. Hal ini dikarenakan penelitian ini secara keseluruhan akan menggunakan data panel kabupaten/kota se Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2004 dimana pada saat itu Kabupaten Bandung Barat masih tergabung dengan Kabupaten Bandung.

3.2 VARIABEL PENELITIAN

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II sub bagian 2.3, definisi istilah desentralisasi sangatlah beragam. Dengan memperhitungkan kemungkinan atau *feasibilitas* dari sebuah pengukuran, maka variabel desentralisasi dalam penelitian ini diukur dengan 3 (tiga) dimensi yaitu: *dimensi fiskal, dimensi fungsional dan dimensi personil* sebagaimana digunakan oleh Hong (2011) hanya saja terdapat beberapa penyesuaian. Sama halnya dengan Hong, pada penelitian ini, variabel desentralisasi tidak dibuat dalam satu indeks gabungan/komposit dari ketiga dimensi tersebut, tetapi berupa indeks terpisah yang selanjutnya dibuat analisis korelasinya dengan setiap variabel yang merupakan *proxy* dari kesejahteraan masyarakat.

Berbeda halnya dengan Hong dimana untuk mengukur *derajat Desentralisasi Fiskal* diukur dengan persentase penerimaan pajak daerah terhadap total penerimaan pajak, maka dalam penelitian ini digunakan *proxy* persentase/rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah (*local revenue*). Hal ini karena implikasi pertama dari diberlakukannya kebijakan desentralisasi adalah bahwa sekarang setiap daerah otonom memiliki kewenangan untuk mencari sumber pendanaannya sendiri. Ini berarti bahwa kini pemerintah daerah dapat mencari pendapatan berdasarkan sumber daya yang mereka miliki. Semakin tinggi rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, menunjukkan semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal di wilayah tersebut, demikian pula sebaliknya. Pendekatan ini mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh Jin dan Zou (2002) dan Slinko (2002) dimana pengukuran derajat desentralisasi fiskal dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerimaan, yaitu mengukur derajat desentralisasi fiskal dan share penerimaan daerah terhadap total penerimaan daerah.

Selanjutnya, *derajat Desentralisasi Fungsional* diukur dengan persentase/rasio pengeluaran pemerintah daerah dari pengeluaran total pemerintah secara nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Hong (2011), sesungguhnya *proxy* yang paling akurat untuk mengukur *derajat desentralisasi fungsional* adalah persentase/rasio fungsi yang diemban oleh pemerintah daerah terhadap fungsi pemerintah total, namun demikian, data time-series dari *proxy* tersebut sulit untuk dikumpulkan, sehingga dalam penelitian ini digunakan pendekatan/*proxy* pengeluaran (*expenditures*).

Sementara itu, *derajat Desentralisasi Personil* diukur dengan persentase/rasio Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat. Hal ini mengingat, salah satu implikasi pemberlakuan kebijakan desentralisasi adalah adanya transfer kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diikuti dengan transfer sumber daya berupa dana, sarana dan personil. Lebih lanjut mengenai variabel *proxy* dari desentralisasi dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Variabel Proxy Desentralisasi

Dimensi	Variabel Proxy
Desentralisasi Fiskal	Persentase/Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total penerimaan daerah (<i>local revenue</i>)
Desentralisasi Fungsi	Persentase/Rasio pengeluaran pemerintah daerah (<i>local government expenditures</i>) terhadap total pengeluaran pemerintah secara nasional
Desentralisasi Personil	Persentase/Rasio Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah terhadap total Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat.

Selain variabel desentralisasi sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, dalam penelitian ini juga akan digunakan variabel kontrol yang terdiri dari *Variabel Investasi* dan *Variabel Tenaga Kerja*. Variabel kontrol ini dibuat dalam rangka untuk melihat kemungkinan adanya variabel-variabel lain diluar variabel yang diteliti, yang dinilai akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Variabel tenaga kerja dimaksud akan menggunakan *proxy* prosentase angkatan kerja yang telah bekerja. Hal ini dikarenakan variabel tenaga kerja disinyalir memiliki kontribusi dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah. Selanjutnya variabel investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio total Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap PDRB di suatu wilayah.

Pemilihan variabel investasi dan variabel tenaga kerja sebagai variabel kontrol dikarenakan variabel ini disinyalir memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sebagaimana digunakan dalam penelitian Jing Jin dan Heng-fu Zou (2000).

Sementara itu, variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel-variabel terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang didefinisikan dalam pengertian luas, yang mencakup beberapa aspek seperti: *aspek ekonomi wilayah*, *aspek infrastruktur*, dan *aspek pendidikan dan aspek kesehatan*. Variabel yang menjadi *proxy* dari *aspek ekonomi wilayah* meliputi: *variabel PDRB per kapita*. Hal ini didasarkan atas logika bahwa variabel PDRB per kapita memberikan informasi mengenai seberapa banyak nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan di setiap daerah, sehingga merupakan indikator dasar untuk memahami kondisi ekonomi suatu daerah secara keseluruhan.

Sementara itu, variabel *aspek infrastruktur* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *variabel pertambahan panjang jalan per kapita*. Variabel ini dinilai penting dalam menunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal ini mengingat tingkat kualitas aspek infrastruktur dapat berfungsi untuk merangsang atau justru mengganggu kegiatan-kegiatan ekonomi meskipun mereka tidak secara langsung menghasilkan produk ekonomi. Dilihat dari teorinya, panjang dan kondisi jalan memang berhubungan erat dengan kenyamanan hidup setiap warga yang lebih jauh dapat dikaitkan dengan aspek kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya untuk mengukur *indikator pendidikan*, penelitian ini menggunakan *proxy* jumlah gedung sekolah per penduduk dan rasio murid terhadap guru untuk tingkatan SLTA. Variabel pertama menunjukkan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur pendidikan tingkat menengah atas, sementara variabel kedua menunjukkan kualitas tingkat pendidikan.

Kemudian, untuk mengukur indikator *kesehatan*, penelitian ini menggunakan *proxy* jumlah dokter per 1.000 penduduk dan jumlah tempat tidur di Rumah Sakit per 1.000.000 penduduk. Di sini, jumlah dokter adalah indikator yang banyak digunakan untuk mewakili pengembangan layanan kesehatan. Sementara itu, jumlah tempat tidur di Rumah Sakit, meski terlihat tidak terkait langsung dengan pembangunan daerah, namun dapat dipastikan memiliki kaitan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu wilayah.

Lebih lanjut mengenai variabel-variabel independen tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Aspek dari Kesejahteraan Masyarakat dan Indikatornya

Aspek	Indikator	Ukuran
Ekonomi Wilayah	PDRB per kapita	PDRB daerah ini dibagi dengan jumlah penduduk.
Infrastruktur	Pertambahan panjang jalan per kapita	Pertambahan panjang jalan (dalam km) dibagi dengan jumlah penduduk
Pendidikan	Jumlah gedung sekolah SLTA per penduduk	Jumlah gedung sekolah SLTA dibagi dengan jumlah penduduk
	Rasio murid dan guru tingkat SLTA	Jumlah murid (negeri) dibagi dengan jumlah guru untuk tingkat SLTA
Kesehatan dan sosial	Jumlah dokter per 1000 penduduk	Jumlah dokter dibagi dengan jumlah penduduk (x1000)
	Jumlah fasilitas puskesmas per 1 juta penduduk	Jumlah fasilitas sosial (puskesmas) dibagi dengan jumlah penduduk (x 1.000.000)

Sama halnya dengan perlakuan pada variabel-variabel independen, penelitian ini juga tidak menghasilkan indeks gabungan/komposit untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa jika perbedaan daerah tidak diukur dengan indikator tunggal melainkan diukur dengan berbagai indikator yang mewakili berbagai aspek, maka hal ini dinilai lebih persuasif untuk melihat berbagai aspek kesejahteraan masyarakat di daerah yang terjadi dalam dirinya sendiri dibandingkan jika harus disusun dalam satu indeks gabungan/komposit tunggal.

3.3 METODE ANALISIS

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran, mengkaji dan menguji keberadaan teori secara empirik dari variabel-variabel *independent* yang mempengaruhi suatu variabel

dependent. Metode analisis deskriptif disusun berdasarkan data sekunder, literatur, jurnal, makalah, artikel dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam melakukan metode analisis kuantitatif dilakukan melalui pemodelan ekonometrika yang diinterpretasikan secara statistik. Teknik yang digunakan dalam menganalisis secara kuantitatif ini dengan menggunakan metode *pooled EGLS (Cross Section Weights)*. Metode *Generalized Least Square (GLS)* adalah *Ordinary Least Square (OLS)* yang sudah mentransformasikan variabel-variabelnya sehingga sudah memenuhi asumsi-asumsi standar kuadrat terkecil. Adapun teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Program *Eviews*.

3.4 JENIS DATA, TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel (*pooled data*) yaitu gabungan data yang terdiri dari data runtut waktu (*time series*) dan data silang tempat (*cross section*) dari 26 daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2004-2010 yang mewakili tahun-tahun pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari penggunaan data panel dalam penelitian (Widarjono, 2005: 254), yaitu: *pertama*, data panel mampu menyediakan data yang lebih banyak karena merupakan gabungan data *time series* dan data *crosssection*, sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar; dan *kedua*, penggabungan informasi dari kedua jenis data *time series* dan *crosssection* dapat mengatasi permasalahan yang timbul sebagai akibat penghilangan variabel (*omitted variabel*).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan (*library research*) dari berbagai sumber untuk mencari gambaran secara faktual, dimulai dengan melakukan kajian pustaka dan *review* hasil penelitian terkait, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang objek dan analisis yang akan dilakukan.

Sifat dari penelitian ini adalah kuantitatif, sehingga data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang berasal dari berbagai dokumen resmi pemerintah seperti Nota Keuangan, Laporan Bank Indonesia, dan Data Basis IPM. Adapun instansi yang mengeluarkan data tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Data mengenai penerimaan dan pengeluaran nasional berasal dari Nota Keuangan Kementerian Keuangan.

- 2) Data mengenai jumlah PNS daerah berasal dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sedangkan data mengenai jumlah PNS nasional berasal dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
- 3) Data mengenai Pendapatan Asli Daerah, Total Penerimaan Daerah, Tenaga Kerja, PDRB perkapita, Panjang jalan perkapita, Jumlah Sekolah SLTA, Jumlah Guru dan Murid tingkat SLTA negeri, jumlah dokter dan jumlah tempat tidur di Rumah Sakit berasal dari basis IPM Provinsi Jawa Barat.
- 4) Data tentang jumlah investasi baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) diperoleh dari Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.

3.5 OPERASIONALISASI VARIABEL

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengartikan variabel pada model penelitian, operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel

No.	Simbol	Variabel	Indikator	Satuan	Skala
1.	DFis	Desentralisasi Fiskal	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (<i>local revenue</i>)	Persen	Rasio
2.	DFung	Desentralisasi Fungsional	Rasio pengeluaran daerah terhadap total pengeluaran nasional	Persen	Rasio
3.	DP	Desentralisasi Personil	Rasio jumlah PNS daerah terhadap total PNS nasional	Persen	Rasio
4.	Invest	Investasi	Rasio PMDN dan PMA terhadap PDRB	Rasio	Rasio

5.	TK	Tenaga Kerja	Prosentase angkatan kerja yang telah bekerja	Persen	Rasio
6.	Y	PDRB perkapita	Rasio PDRB atas dasar harga konstan setiap daerah terhadap jumlah penduduk daerah tersebut	Rupiah	Rasio
7.	PJcap	Panjang jalan perkapita	Rasio panjang jalan berkualitas baik terhadap jumlah penduduk	Kilometer	Rasio
8.	Sklhpddk	Jumlah sekolah SLTA per penduduk	Jumlah gedung sekolah SLTA dibagi jumlah penduduk	Buah	Rasio
9.	MG	Rasio Murid dan Guru SLTA	Jumlah Murid tingkat SLTA dibagi dengan jumlah gurunya	Rasio	Rasio
10.	DRCap	Dokter	Jumlah dokter per 1000 penduduk	Orang	Rasio
11.	Ttidpddk	Fasilitas Sosial Kesehatan	Fasilitas tempat tidur di Rumah Sakit per 1 juta penduduk	Buah	Rasio

3.6 MODEL PENELITIAN

Pada umumnya, model yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada model yang dikembangkan oleh Hong (2011) dengan beberapa penyesuaian dalam pendefinisian variabel independen yang digunakannya untuk mengukur derajat desentralisasi dan juga variabel dependen yang menjelaskan tentang kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, secara matematis model yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) model, yang diformulasikan sebagai berikut:

- ❖ Untuk melihat dampak kebijakan desentralisasi terhadap kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi wilayah (*regional economic disparity*) digunakan model 1:

$$Y = \beta_1 + \beta_2 DFis + \beta_3 DFung + \beta_4 DP + \beta_5 Invest + \beta_6 TK + \varepsilon \quad \dots(3.1)$$

- ❖ Untuk melihat dampak kebijakan desentralisasi terhadap kesejahteraan masyarakat di bidang infrastruktur:

$$PJ_{CAP} = \gamma_1 + \gamma_2 DFis + \gamma_3 DFung + \gamma_4 DP + \gamma_5 Invest + \gamma_6 TK + \varepsilon \quad \dots(3.2)$$

- ❖ Untuk melihat dampak kebijakan desentralisasi terhadap kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan:

$$SKLHPDDK = \theta_1 + \theta_2 DFis + \theta_3 DFung + \theta_4 DP + \theta_5 Invest + \theta_6 TK + \varepsilon \quad \dots(3.3)$$

$$MG = \delta_1 + \delta_2 DFis + \delta_3 DFung + \delta_4 DP + \delta_5 Invest + \delta_6 TK + \varepsilon \quad \dots(3.4)$$

- ❖ Untuk melihat dampak kebijakan desentralisasi terhadap kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan:

$$DRCap = \rho_1 + \rho_2 DFis + \rho_3 DFung + \rho_4 DP + \rho_5 Invest + \rho_6 TK + \varepsilon \quad \dots(3.5)$$

$$TTIDPDDK = \varphi_1 + \varphi_2 DFis + \varphi_3 DFung + \varphi_4 DP + \varphi_5 Invest + \varphi_6 TK + \varepsilon \quad \dots(3.6)$$

di mana:

Ypcap	= PDRB perkapita
PJcap	= Panjang jalan berkualitas baik perkapita
DRcap	= Rasio dokter per 1000 penduduk
SKLHPDDK	= Rasio gedung sekolah SLTA per penduduk
MG	= Rasio murid dan guru tingkat SLTA
TTIDPDDK	= Rasio jumlah tempat tidur di rumah sakit per satu juta penduduk
DFis	= Desentralisasi fiskal
DFung	= Desentralisasi fungsional
DP	= Desentralisasi personil
TK	= Jumlah tenaga kerja
Invest	= Investasi

$\beta, \gamma, \delta, \theta, \rho, \phi$ = koefisien regresi
 ε = *error term* (gangguan)

3.7 TEKNIK ESTIMASI DAN EVALUASI MODEL

Dalam penelitian ini akan digunakan tiga teknik estimasi yaitu: metode PLS (*Common Effect*), model *Fixed Effect*, dan model *Random Effect*. Setelah itu akan dilakukan pengujian kesesuaian model dengan menggunakan uji: *Chow Test*, *Hausman Test* dan *Langrange Multiplier (LM) test*.

Chow Test (Uji F)

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan *Fixed Effect* lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy dengan melihat *residual sum of squares*.

Lagrange Multiplier (LM) Test

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari metode OLS. Uji ini didasarkan pada distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independent. Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik *chi squares* maka kita menolak hipotesis nul. Artinya, estimasi yang tepat untuk model regresi panel data adalah model *Random Effect* daripada metode OLS. Sebaliknya, jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik *Chi-Squares* sebagai nilai kritis maka kita menerima hipotesis nul. Estimasi *Random Effect* dengan demikian tidak bisa digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode OLS.

Uji Hausman

Uji ini dilakukan untuk mengetahui teknik yang paling tepat dalam regresi panel data antara model *Fixed Effect* dan model *Random Effect*. Statistika uji Hausman mengikuti distribusi statistika *Chi-square* dengan *degree of freedom* sebanyak k yaitu jumlah variabel independen. Jika nilai *Hausman* lebih besar dari nilai kritisnya, maka model yang tepat adalah *model Fixed Effect* dan sebaliknya jika nilai statistika Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya, maka model yang tepat adalah *model Random Effect*. Pemilihan model *Fixed* atau *Random* dapat juga dilihat dari nilai probabilitasnya yaitu jika nilai probabilitas dibawah α maka model yang dipilih *Fixed Effect*.

Uji Kriteria Statistika

Uji ini ditentukan oleh teori statistika, yaitu penaksiran koefisien

determinasi (R^2), uji signifikansi parsial dengan Uji t dan uji koefisien regresi secara menyeluruh dengan Uji F.

- 1) Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Untuk menentukan apakah variabel-variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya dengan baik menggunakan nilai R^2 . Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jika nilainya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya, sebaliknya jika mendekati nol maka garis regresi kurang baik.
- 2) Uji t
Uji t dilakukan untuk melihat adanya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk itu perlu diketahui nilai statistika t dan mencari nilai t kritis dari tabel distribusi t pada α dan *degree of freedom* tertentu. Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka secara statistik variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 3) Uji F
Pada regresi berganda memiliki lebih dari satu variabel independen, sehingga perlu dievaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen dengan uji F. Untuk menentukan signifikan atau tidaknya variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel terikatnya, dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai F tabel dengan nilai F hitung. Apabila F hitung (F Statistik) lebih besar dari F tabel maka secara bersama-sama variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya.

BAB IV

KONDISI UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

4.1 KONDISI GEOGRAFIS PROVINSI JAWA BARAT

Secara geografis, Provinsi Jawa Barat terletak pada posisi 5°50' - 7°50' Lintang Selatan dan 104°48' - 108°48' Bujur Timur. Provinsi yang dibentuk untuk pertama kalinya pada tanggal 14 Agustus 1926 ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta di sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah Timur, berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia di sebelah Selatan dan berbatasan dengan Provinsi Banten di sebelah Barat.



Gambar 4.1 Peta Jawa Barat

Sumber: www.jabar.go.id

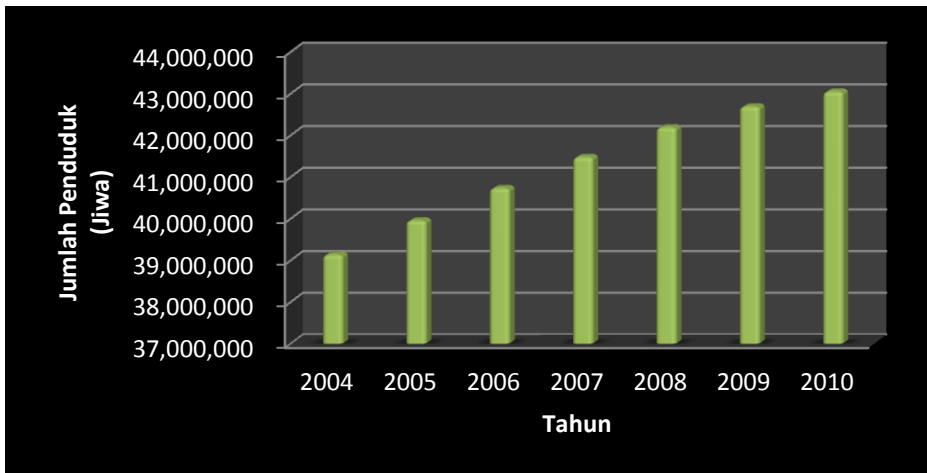
Provinsi Jawa Barat mempunyai wilayah daratan seluas 3.710.061,32 hektar dan garis pantai sepanjang 755,829 km. Luas wilayah daratan Jawa Barat ini dapat dibedakan menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah pegunungan curam, wilayah lereng bukit yang landai dan wilayah dataran luas. *Pertama* wilayah pegunungan curam terletak di bagian Selatan dengan luas 9,5% dari total luas wilayah Jawa Barat dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, *kedua*

wilayah lereng bukit yang landai terletak di bagian Tengah dengan luas sebesar 36,48% dari total Jawa Barat dengan ketinggian 10 hingga 1.500 m di atas permukaan laut dan *ketiga* wilayah dataran luas yang terletak di bagian Utara dengan luas sebesar 54,03% dari keseluruhan dataran Jawa Barat dengan ketinggian 0 hingga 10 m di atas permukaan laut. Dengan wilayah yang demikian menjadikan Jawa Barat beriklim tropis. Suhu rata-rata di provinsi ini berkisar antara 17,4 – 30,7°C dan kelembaban udara sekitar 73–84%. Berdasarkan data yang diperoleh dari BMKG, sepanjang tahun 2008 turun hujan selama 1-26 hari setiap bulannya dengan curah hujan antara 3,6 hingga 332,8 mm.

Apabila dilihat berdasarkan kondisi administratif, provinsi yang mempunyai visi ***Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia*** ini terdiri dari 17 kabupaten dan 9 kota yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar. Dari 26 kabupaten/kota tersebut terdapat 520 kecamatan, 5.245 desa dan 626 kelurahan.

4.2 KONDISI DEMOGRAFIS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

Selama kurun waktu 7 tahun (dari tahun 2004 hingga tahun 2010), jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk provinsi yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak di Indonesia ini adalah 2% per tahun. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, sekitar 18% penduduk Indonesia menempati wilayah Provinsi Jawa Barat. Tepatnya sebanyak 43,053,732 orang berdomisili di Jawa Barat pada tahun 2010. Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat dari tahun 2004 hingga tahun 2010 disajikan dalam Grafik 4.1 berikut ini.



Grafik 4.1 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2010

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka (berbagai tahun)

Dari 43,05 juta jiwa penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 tersebut tersebar kurang merata pada 26 kabupaten/kota. Data yang diolah dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pada tahun 2010, jumlah penduduk provinsi ini paling banyak mendiami wilayah Kabupaten Bogor. Sekitar 11,08% atau tepatnya 4,771,932 jiwa berdomisili di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bandung menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Jawa Barat yaitu sekitar 7,38% atau tepatnya 2,341,409 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2010 ini hampir setengahnya dari jumlah penduduk di Kabupaten Bogor.

Sebaliknya, Kota Sukabumi, Kota Cirebon dan Kota Banjar merupakan daerah-daerah dengan jumlah penduduk terkecil di Jawa Barat. Jumlah penduduk Kota Sukabumi dan Kota Cirebon pada tahun 2010 mempunyai proporsi yang hampir sama yaitu sebesar 0,69% dari total penduduk Jawa Barat, masing-masing sebesar 298,681 jiwa dan 296,389 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang mendiami wilayah Kota Banjar hanya sekitar 0,41% atau tepatnya 175,157 jiwa. Tabel 4.1 berikut ini secara lengkap menyajikan distribusi penduduk di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase terhadap Jawa Barat (%)
1	Kab. Bogor	4,771,932	11.08
2	Kab. Bandung	2,341,409	7.38
3	Kab. Bekasi	2,171,281	6.11
4	Kab. Garut	4,688,827	5.58
5	Kota Bandung	2,404,121	5.56
6	Kab. Sukabumi	1,675,675	5.44
7	Kota Bekasi	1,532,504	5.42
8	Kab. Cianjur	1,035,589	5.04
9	Kab. Karawang	2,067,196	4.94
10	Kab. Cirebon	1,166,473	4.80
11	Kota Depok	1,093,602	4.04
12	Kab. Tasikmalaya	1,663,737	3.89
13	Kab. Indramayu	1,465,157	3.86
14	Kab. Ciamis	852,521	3.56
15	Kab Bandung Barat	2,127,791	3.51
16	Kab. Subang	2,630,401	3.40
17	Kab. Majalengka	950,334	2.71
18	Kab. Sumedang	298,681	2.54
19	Kab. Kuningan	2,394,873	2.41
20	Kota Bogor	296,389	2.21
21	Kab. Purwakarta	2,334,871	1.98
22	Kota Tasikmalaya	1,738,570	1.48
23	Kota Cimahi	541,177	1.26
24	Kota Sukabumi	635,464	0.69
25	Kota Cirebon	175,157	0.69
26	Kota Banjar	4,771,932	0.41

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, tampak bahwa proporsi jumlah penduduk yang mendiami wilayah kabupaten jauh lebih besar dibandingkan dengan proporsi jumlah penduduk yang mendiami wilayah kota. Sekitar 78,25% atau sebanyak 33,688,216 jiwa penduduk Provinsi

Jawa Barat mendiami wilayah kabupaten, sedangkan 21,75% atau sebanyak 9,365,516 jiwa sisanya mendiami wilayah kota.

4.3 KONDISI KEUANGAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

Berbicara mengenai kondisi keuangan pada suatu daerah pastinya tidak akan terlepas dengan kondisi penerimaan dan kondisi pengeluaran daerah tersebut. Begitu pula yang akan dibahas dalam subbag ini. Total penerimaan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat secara umum menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, sebagai akhir dari periode penelitian menunjukkan hal demikian. Dengan rata-rata sebesar 10,47 persen bukan berarti tidak ada daerah kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengalami penurunan laju pertumbuhan total penerimaan pada tahun 2010. Kabupaten Ciamis misalnya, laju pertumbuhan total penerimaan pada tahun ini adalah negatif 2,05 persen. Dengan nilai seperti ini membawa Kabupaten Ciamis sebagai daerah dengan laju pertumbuhan total penerimaan terendah di Jawa Barat. Lain halnya dengan Kota Tasikmalaya. Daerah ini mengalami peningkatan total penerimaan yang pesat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Jawa Barat. Dengan laju pertumbuhan sebesar 24,91 persen mampu membawa Kota Tasikmalaya sebagai daerah dengan laju pertumbuhan total penerimaan tertinggi di Jawa Barat. Tabel 4.2 berikut ini memperlihatkan total penerimaan dan laju pertumbuhan penerimaan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010.

Tabel 4.2 Total Penerimaan dan Laju Pertumbuhan Total Penerimaan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 (Ribu Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Total Penerimaan	Laju Pertumbuhan
1	Kab. Bogor	2,511,474,972.40	15.30
2	Kab. Sukabumi	1,519,735,050.96	6.10
4	Kab. Bandung	3,067,431,904.17	8.80
5	Kab. Garut	1,695,066,200.91	6.29
6	Kab. Tasikmalaya	1,309,528,239.96	6.72
7	Kab. Ciamis	1,318,623,298.75	-2.05
8	Kab. Kuningan	1,115,998,383.00	17.39
9	Kab. Cirebon	1,483,375,456.53	15.43
10	Kab. Majalengka	1,122,795,910.29	16.17
11	Kab. Sumedang	1,086,557,300.14	12.38
12	Kab. Indramayu	1,375,172,959.30	13.99
13	Kab. Subang	1,186,278,289.47	6.70
14	Kab. Purwakarta	848,949,139.00	8.56
15	Kab. Karawang	1,622,759,874.49	21.01
16	Kab. Bekasi	1,735,259,432.75	6.87
17	Kota Bogor	842,751,061.67	1.78
18	Kota Sukabumi	565,149,868.77	11.77
19	Kota Bandung	2,440,160,360.71	1.57
20	Kota Cirebon	758,677,816.26	19.05
21	Kota Bekasi	1,582,441,084.73	7.16
22	Kota Depok	1,070,305,504.08	14.70
23	Kota Cimahi	619,489,083.48	4.63
24	Kota Tasikmalaya	829,347,403.36	24.91
25	Kota Banjar	384,139,244.22	6.02

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2010 (diolah)

Apabila dilihat berdasarkan sumber penerimaannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu kontributor penerimaan daerah yang dapat dikaitkan dengan kemandirian suatu daerah. Semakin besar persentase PAD terhadap total penerimaan dibandingkan dengan persentase sumber pendapatan lainnya terhadap total penerimaan menunjukkan semakin mandiri suatu daerah. Tabel 4.3 berikut ini menyajikan persentase PAD terhadap total penerimaan kabupaten/kota di Jawa Barat

Tabel 4.3 Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2010

No.	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kab. Bogor	20.04	18.34	16.83	16.56	16.75	15.51	15.90
2	Kab. Sukabumi	5.04	5.21	5.98	6.11	7.15	5.63	6.48
3	Kab. Cianjur	6.85	8.46	7.73	6.50	6.50	7.08	
4	Kab. Bandung	9.83	9.02	8.62	17.19	7.87	6.83	8.12
5	Kab. Garut	6.38	7.17	6.00	6.56	6.11	6.44	6.43
6	Kab. Tasikmalaya	4.28	4.16	3.96	3.63	4.72	4.05	3.69
7	Kab. Ciamis	5.88		3.52	5.20	4.03	3.81	3.83
8	Kab. Kuningan	5.95	7.04	5.60	5.67	5.08	6.69	6.11
9	Kab. Cirebon	8.29	10.18	9.94	9.93	9.08	9.03	9.40
10	Kab. Majalengka	5.84	6.81	7.14	5.78	5.22	7.05	6.80
11	Kab. Sumedang	10.80	11.92	10.35	8.79	9.84	10.58	10.00
12	Kab. Indramayu	7.00	6.50	6.03	4.93	5.48	7.16	7.41
13	Kab. Subang	7.87	6.95	6.98	3.53	3.06	6.09	6.37
14	Kab. Purwakarta	13.81	11.43	10.32	8.92	9.38	8.19	9.01
15	Kab. Karawang	15.84	11.18	11.40	11.23	11.74	9.97	12.96
16	Kab. Bekasi	25.70	17.43	19.17	17.43	17.81	17.69	14.91
17	Kota Bogor	12.92	17.73	45.23	12.60	13.62	15.13	15.13
18	Kota Sukabumi	12.75	15.63	12.69	11.20	14.58	13.09	16.19
19	Kota Bandung	19.92	20.36	16.11	17.04	15.58	14.99	18.11
20	Kota Cirebon	14.86	11.14	13.46	11.30	12.19	12.13	15.18
21	Kota Bekasi	15.37	17.21	16.31	15.41	14.98	15.69	18.71
22	Kota Depok	11.79	12.53	11.22	11.25	12.75	12.40	11.98
23	Kota Cimahi	14.70		12.85	12.52	12.95	12.67	14.10
24	Kota Tasikmalaya	10.35	8.98	10.77	10.56	9.91	11.52	12.63
25	Kota Banjar	4.89	9.74	7.04	6.05	7.40	7.73	9.73

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Berbagai Tahun (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, persentase PAD terhadap total penerimaan secara umum menunjukkan adanya fluktuasi. Kabupaten Bekasi pun demikian. Walaupun daerah ini mempunyai persentase PAD terhadap total penerimaan terbesar dibandingkan daerah lainnya di Jawa Barat, akan tetapi terjadinya fluktuasi besaran persentase kerap terjadi. Pada tahun 2004 misalnya, persentase PAD terhadap total penerimaan yang dimiliki Kabupaten Bekasi adalah sebesar 25,70 persen, kemudian pada tahun 2005 mengalami penurunan hingga mencapai 17,43 persen.

Tahun 2006 persentase PAD kabupaten ini kembali mengalami perbaikan hingga sebesar 19,17 persen. Tiga tahun berturut-turut, dari 2007 hingga 2009 persentase PAD yang dimiliki Kabupaten Bekasi masing-masing sebesar 17,43 persen, 17,81 persen dan 17,69 persen. Sampai akhir periode penelitian, yaitu tahun 2010 persentase PAD terhadap total penerimaan daerah ini kembali mengalami penurunan hingga ke *level* 14,91 persen.

Demikian halnya dengan Kabupaten Tasikmalaya. Secara umum selama periode penelitian, besarnya persentase PAD terhadap total penerimaan di daerah ini menunjukkan adanya fluktuasi dengan kecenderungan menurun setiap tahunnya. Pada awal penelitian, tahun 2004, persentase PAD terhadap total penerimaan adalah sebesar 4,28 persen. Tiga tahun berturut-turut, dari 2005 hingga tahun 2007 menunjukkan adanya penurunan, dari 4,16 persen pada tahun 2005, 3,96 persen di tahun 2006 hingga 3,63 persen pada tahun 2007. Namun, pada tahun 2008, persentase PAD terhadap total penerimaan di daerah ini kembali mengalami peningkatan hingga melebihi persentase pada awal penelitian yaitu mencapai *level* 4,72 persen.

Kemudian dari sisi belanja daerah terhadap belanja Negara disajikan pada Tabel 4.4 berikut ini.

**Tabel 4.4 Persentase Belanja Daerah terhadap Belanja Negara
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2010**

No.	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kab. Bogor	0.22	0.21	0.17	0.20	0.18	0.21	0.26
2	Kab. Sukabumi	0.15	0.12	0.13	0.14	0.13	0.12	0.16
3	Kab. Cianjur	0.13	0.12	0.13	0.14	0.13	0.12	
4	Kab. Bandung	0.26	0.22	0.21	0.26	0.17	0.25	0.31
5	Kab. Garut	0.14	0.14	0.15	0.16	0.14	0.14	0.17
6	Kab. Tasikmalaya	0.11	0.10	0.12	0.12	0.10	0.12	0.13
7	Kab. Ciamis	0.12	0.11	0.13	0.15	0.13	0.12	0.14
8	Kab. Kuningan	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11
9	Kab. Cirebon	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.14
10	Kab. Majalengka	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.11
11	Kab. Sumedang	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11
12	Kab. Indramayu	0.12	0.11	0.07	0.13	0.11	0.12	0.13
13	Kab. Subang	0.08	0.07	0.11	0.13	0.16	0.16	0.12
14	Kab. Purwakarta	0.08	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.09
15	Kab. Karawang	0.13	0.13	0.14	0.14	0.12	0.12	0.15
16	Kab. Bekasi	0.15	0.14	0.14	0.15	0.11	0.18	0.17
17	Kota Bogor	0.09	0.08	0.05	0.08	0.07	0.07	0.09
18	Kota Sukabumi	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
19	Kota Bandung	0.22	0.22	0.19	0.20	0.21	0.22	0.25
20	Kota Cirebon	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.08
21	Kota Bekasi	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.16
22	Kota Depok	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.13
23	Kota Cimahi	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06
24	Kota Tasikmalaya	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.09
25	Kota Banjar	0.02	0.02	0.03	0.05	0.03	0.04	0.04

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Berbagai Tahun (diolah)

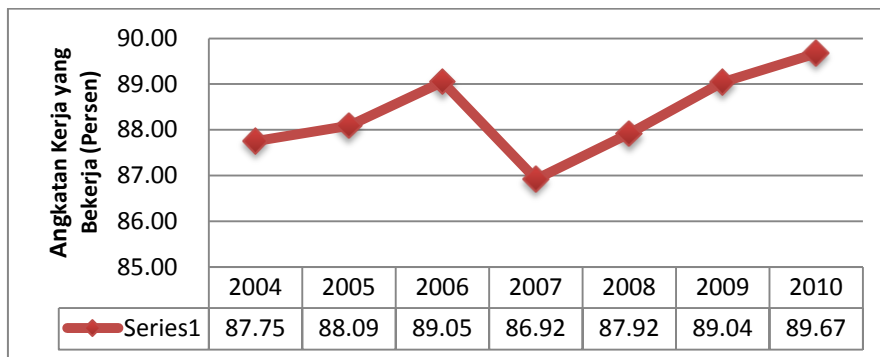
Kondisi keuangan dilihat dari segi persentase belanja kabupaten/kota di Jawa Barat terhadap total belanja Negara seperti yang disajikan pada Tabel 4.4 di atas pun menunjukkan adanya fluktuasi dengan kisaran antara 0,02 persen hingga 0,31 persen. Persentase sebesar 0,02 persen dimiliki oleh Kota Banjar pada tahun 2004 dan 2005,

sedangkan persentase sebesar 0,31 persen dimiliki oleh Kabupaten Bandung pada tahun 2010.

4.4 KONDISI ANGKATAN KERJA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

Pertumbuhan ekonomi yang stabil tidak mungkin terjadi tanpa ditopang oleh angkatan kerja yang handal. Badan Pusat Statistika membagi angkatan kerja menjadi tiga bagian, *pertama* penduduk usia kerja¹ yang bekerja, *kedua* penduduk usia kerja yang mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sehingga apabila suatu daerah mempunyai jumlah angkatan kerja yang bekerja cukup tinggi, maka tentu saja akan mempengaruhi iklim perekonomian di daerah tersebut. Provinsi Jawa Barat misalnya.

Selama tujuh tahun berjalan, periode 2004 hingga 2010, Provinsi Jawa Barat telah berupaya untuk terus mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Hal ini dapat dibuktikan pada Grafik 4.2 yang menunjukkan persentase jumlah angkatan kerja yang bekerja pada periode tersebut secara umum mempunyai trend yang meningkat, meskipun pada beberapa tahun menunjukkan adanya suatu penurunan.



Grafik 4.2 Persentase Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2010

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Berbagai Tahun (diolah)

¹ Pada tahun 2002 hingga tahun 2007, yang termasuk ke dalam usia kerja adalah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas. Namun, mengacu kepada *The Labor Force Concept* yang dikeluarkan oleh *International Labor Organization* (ILO), mulai tahun 2008, yang termasuk ke dalam usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas (bps.go.id).

Persentase jumlah angkatan kerja yang bekerja di Jawa Barat pada tahun 2004 adalah sebesar 87,75%. Kemudian dengan laju pertumbuhan sebesar 0,39% pada tahun 2005 persentase jumlah angkatan kerja yang bekerja ini mencapai 88,09%. Demikian pula pertumbuhan ini terjadi pada tahun 2006. Dengan laju pertumbuhan sebesar 1,09%, persentase jumlah angkatan kerja yang bekerja di provinsi ini mencapai 89,05%. Namun, pertumbuhan persentase jumlah angkatan kerja yang bekerja di provinsi ini mengalami penurunan di tahun 2007. Pada tahun 2007, persentase jumlah angkatan kerja yang bekerja hanya mencapai 86,92%.

Meskipun demikian, seiring komitmen Provinsi Jawa Barat yang terus mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,15% pada tahun 2008 persentase angkatan kerja ini kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 87,92%. Bahkan pada tahun 2009 laju pertumbuhan angkatan kerja ini mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2008 yaitu sebesar 1,27%. Sehingga persentase angkatan kerja pada tahun 2009 sebesar 89,04%. Akhir periode penelitian, pada tahun 2010, walaupun secara nominal jumlah angkatan kerja yang bekerja mengalami kenaikan hingga mencapai 89,67% akan tetapi apabila dilihat berdasarkan laju pertumbuhan, persentase tersebut menunjukkan adanya laju pertumbuhan yang menurun hingga mencapai 0,71%.

4.5 KONDISI PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

Rasio jumlah Pegawai Negeri Sipil daerah terhadap keseluruhan Pegawai Negeri yang ada di Indonesia digunakan sebagai *proxy* dari desentralisasi personil. Secara umum selama periode penelitian, jumlah PNS kabupaten/kota di provinsi ini mempunyai kecenderungan meningkat setiap tahunnya, walaupun terdapat beberapa daerah yang mengalami fluktuasi. Kabupaten Bandung contohnya, sebagai daerah dengan jumlah PNS tertinggi pada tahun 2010 mengalami fluktuasi jumlah PNS. Pada awal penelitian, tahun 2004, jumlah PNS di Kabupaten Bandung adalah sebanyak 29,130 orang. Namun pada tahun 2005 jumlah ini tidak bertahan, malahan berkurang hingga mencapai 28,239 orang. Pada tahun 2006 jumlah PNS di daerah ini mengalami kenaikan hingga sebanyak 28,254 orang, akan tetapi kembali mengalami penyusutan pada tahun 2007 hingga mencapai 28,186 orang. Meskipun demikian, dua tahun berturut-turut, yaitu 2008 dan 2009, jumlah PNS di daerah ini mengalami kenaikan. Pada periode terakhir penelitian, meskipun jumlah PNS di Kabupaten Bandung merupakan terbesar dibandingkan dengan

daerah-daerah lainnya, akan tetapi jumlahnya berkurang hingga mencapai 31,924 orang.

Demikian halnya dengan Kota Banjar, sebagai salah satu daerah dengan usia yang lebih muda dibandingkan daerah-daerah lainnya dan mempunyai jumlah PNS yang paling kecil diantara daerah-daerah lainnya di Jawa Barat, dari awal periode penelitian hingga akhir periode penelitian memiliki kecenderungan yang hampir sama dengan dengan Kabupaten Bandung. Pada tahun 2004 jumlah PNS di daerah ini adalah sebanyak 2,066 orang. Jumlah ini kemudian berkurang pada tahun 2005 hingga sebesar 1,982 orang. Namun pada tahun 2006 jumlah PNS di Kota Banjar kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 2,375 orang. Jumlah PNS pada tahun 2007 berkurang sedikit hingga sebesar 2,363 orang. Pada tahun 2008 dan 2009, jumlah PNS di Kota Banjar ini mengalami peningkatan yang signifikan hingga masing-masing mencapai 2,809 orang dan 3,658 orang. Akhir periode penelitian yaitu tahun 2010 kembali mengalami penurunan hingga sebesar 3,498 orang. Mengenai kondisi PNS di lingkungan kabupaten/kota di Jawa Barat selengkapnya disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2010

No.	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kab. Bogor	16899	16444	16857	16885	19788	21258	20490
2	Kab. Sukabumi	13323	12955	13752	13688	16312	16849	16554
3	Kab. Cianjur	14316	14093	14320	14257	16363	16969	16460
4	Kab. Bandung	29130	28239	28254	28186	30560	32911	31924
5	Kab. Garut	18886	18160	18389	18320	20507	21687	20842
6	Kab. Tasikmalaya	14501	14053	15162	15123	16662	16759	16146
7	Kab. Ciamis	17371	16873	17239	17180	18918	19742	18581
8	Kab. Kuningan	11241	10903	11624	11574	15386	16405	15639
9	Kab. Cirebon	14025	13608	14380	14378	16999	17631	17146
10	Kab. Majalengka	12054	11622	12310	12273	14869	15298	14873
11	Kab. Sumedang	12490	12089	12335	12557	14315	14582	14164
12	Kab. Indramayu	11692	11673	11827	11796	15252	17138	16484
13	Kab. Subang	11708	11271	11505	11459	13927	14979	14546
14	Kab. Purwakarta	6798	6557	7267	7256	9766	10587	10215
15	Kab. Karawang	12794	12357	12651	12607	14221	15097	14595
16	Kab. Bekasi	8742	8529	9050	9013	12519	13934	13828
17	Kota Bogor	6940	6676	7499	7477	9389	9804	9522
18	Kota Sukabumi	4130	4101	4222	4201	4783	5513	5671
19	Kota Bandung	21983	19614	21222	21150	24276	25297	23994
20	Kota Cirebon	5237	4935	5305	5270	6200	7090	6967
21	Kota Bekasi	8250	8123	8821	8824	11833	13332	13225
22	Kota Depok	5697	5604	6519	6525	7237	7575	7856
23	Kota Cimahi	4477	4335	4392	4365	5352	6186	6255
24	Kota Tasikmalaya	7014	6812	6872	6860	7806	9587	
25	Kota Banjar	2066	1982	2375	2363	2809	3658	3498

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka (berbagai tahun)

Apabila dibandingkan, jumlah PNS kabupaten/kota di Jawa Barat terhadap jumlah PNS di Indonesia mempunyai angka yang relative sangat kecil. Rata-rata rasio jumlah PNS kabupaten/kota di Jawa Barat terhadap PNS Indonesia pada tahun 2004 adalah sebesar 0,33 persen. Rata-rata rasio untuk tahun 2005 adalah 0,31 persen. Kemudian pada tahun 2006 rata-rata rasio jumlah PNS daerah di Jawa Barat terhadap PNS Indonesia meningkat hingga mencapai 0,32 persen, akan tetapi pada tahun 2007

mengalami penurunan hingga sebesar 0,29 persen. Dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2008 dan 2009 rasio ini kembali mengalami peningkatan dengan rasio yang sama yaitu mencapai 0,34 persen dan pada akhir periode penelitian kembali menurun hingga sebesar 0,32 persen. Tabel 4.6 berikut ini menyajikan secara lengkap rasio jumlah PNS kabupaten/kota di Jawa Barat terhadap jumlah PNS di Indonesia.

Tabel 4.6 Persentase Jumlah PNS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat terhadap Jumlah PNS Indonesia Tahun 2004-2010

No.	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kab. Bogor	0.47	0.45	0.45	0.42	0.48	0.49	0.45
2	Kab. Sukabumi	0.37	0.35	0.37	0.34	0.40	0.38	0.36
3	Kab. Cianjur	0.40	0.38	0.38	0.35	0.40	0.39	0.36
4	Kab. Bandung	0.81	0.77	0.76	0.69	0.75	0.75	0.69
5	Kab. Garut	0.53	0.50	0.49	0.45	0.50	0.50	0.45
6	Kab. Tasikmalaya	0.40	0.38	0.41	0.37	0.41	0.38	0.35
7	Kab. Ciamis	0.48	0.46	0.46	0.42	0.46	0.45	0.40
8	Kab. Kuningan	0.31	0.30	0.31	0.28	0.38	0.37	0.34
9	Kab. Cirebon	0.39	0.37	0.39	0.35	0.42	0.40	0.37
10	Kab. Majalengka	0.34	0.32	0.33	0.30	0.36	0.35	0.32
11	Kab. Sumedang	0.35	0.33	0.33	0.31	0.35	0.33	0.31
12	Kab. Indramayu	0.33	0.32	0.32	0.29	0.37	0.39	0.36
13	Kab. Subang	0.33	0.31	0.31	0.28	0.34	0.34	0.32
14	Kab. Purwakarta	0.19	0.18	0.20	0.18	0.24	0.24	0.22
15	Kab. Karawang	0.36	0.34	0.34	0.31	0.35	0.34	0.32
16	Kab. Bekasi	0.24	0.23	0.24	0.22	0.31	0.32	0.30
17	Kota Bogor	0.19	0.18	0.20	0.18	0.23	0.22	0.21
18	Kota Sukabumi	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.13	0.12
19	Kota Bandung	0.61	0.54	0.57	0.52	0.59	0.58	0.52
20	Kota Cirebon	0.15	0.13	0.14	0.13	0.15	0.16	0.15
21	Kota Bekasi	0.23	0.22	0.24	0.22	0.29	0.30	0.29
22	Kota Depok	0.16	0.15	0.17	0.16	0.18	0.17	0.17
23	Kota Cimahi	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13	0.14	0.14
24	Kota Tasikmalaya	0.20	0.19	0.18	0.17	0.19	0.22	
25	Kota Banjar	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka (berbagai tahun)

4.6 PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

Pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan oleh PDRB per kapita di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat selama tujuh tahun periode penelitian secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Kenaikan PDRB per kapita seperti yang disajikan pada Tabel 4.7 di bawah ini hanya dilihat dari sisi jumlah.

Tabel 4.7 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 (Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 dalam Ribu Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kab. Bogor	6,000	6,110	6,296	6,522	6,752	6,949	6,816
2	Kab. Sukabumi	3,090	3,203	3,304	3,416	3,502	3,622	3,689
3	Kab. Cianjur	3,160	3,250	3,317	3,417	3,520	3,627	3,818
4	Kab. Bandung	5,218	5,341	4,010	5,626	5,835	6,028	6,376
5	Kab. Garut	3,724	3,778	3,843	3,937	4,034	4,220	4,629
6	Kab. Tasikmalaya	2,554	2,561	2,588	2,725	2,761	2,844	3,292
7	Kab. Ciamis	3,698	3,818	3,908	4,049	4,196	4,376	4,848
8	Kab. Kuningan	2,863	2,916	2,976	3,042	3,111	3,223	3,831
9	Kab. Cirebon	2,897	3,009	3,125	3,249	3,362	3,503	3,943
10	Kab. Majalengka	2,859	2,970	3,077	3,210	3,338	3,472	3,797
11	Kab. Sumedang	4,132	4,222	4,307	4,416	4,528	4,704	5,128
12	Kab. Indramayu	7,643	7,001	7,097	7,216	7,532	7,493	8,497
13	Kab. Subang	4,004	4,238	4,284	4,437	4,592	4,766	5,051
14	Kab. Purwakarta	7,297	7,451	7,599	7,763	8,032	12,026	8,514
15	Kab. Karawang	6,921	7,293	7,665	7,986	8,688	9,234	10,083
16	Kab. Bekasi	20,329	21,153	21,993	22,875	23,747	24,416	20,905
17	Kota Bogor	4,033	4,223	4,419	4,633	4,852	5,034	5,032
18	Kota Sukabumi	4,815	4,936	5,121	5,345	5,530	5,809	6,428
19	Kota Bandung	8,677	9,228	9,845	10,549	11,287	12,104	13,235
20	Kota Cirebon	16,938	17,503	18,196	18,980	16,091	16,613	17,700
21	Kota Bekasi	5,752	5,885	6,104	6,358	6,597	6,717	6,628
22	Kota Depok	3,282	3,457	3,635	3,838	4,033	4,181	3,750
23	Kota Cimahi	10,146	10,374	10,605	10,865	11,103	11,282	12,027

24	Kota Tasikmalaya	4,892	4,960	5,075	5,258	5,447	5,728	6,103
25	Kota Banjar	3,369	3,389	3,478	3,576	3,668	3,828	4,276

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka (berbagai tahun)

Dari Tabel 4.7 terlihat bahwa Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan PDRB per kapita terbesar di Provinsi Jawa Barat. Selama periode penelitian, PDRB per kapita daerah ini berkisar antara 20,329 hingga 24,416 ribu rupiah. Disusul oleh Kota Cirebon dan Kota Cimahi sebagai daerah dengan PDRB per kapita terbesar di Jawa Barat. Masing-masing daerah tersebut mempunyai rentang PDRB per kapita antara 16,091 hingga 18,980 ribu rupiah untuk Kota Cirebon dan 10,146 hingga 12,027 ribu rupiah untuk Kota Cimahi. Sebaliknya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka merupakan tiga daerah dengan PDRB per kapita terendah di Provinsi Jawa Barat. Selama periode penelitian, Kabupaten Tasikmalaya mempunyai rentang PDRB per kapita antara 2,554 hingga 3,292 ribu rupiah. PDRB per kapita Kabupaten Kuningan berkisar antara 2,863 hingga 3,831 ribu rupiah.

Lain halnya apabila ditinjau dari laju pertumbuhannya pada Tabel 4.8. Berdasarkan tersebut dapat diketahui bahwa secara umum menunjukkan adanya fluktuasi selama periode penelitian dengan rata-rata laju pertumbuhan yang berkisar antara 0,71 hingga 7,29 persen. Dari Tabel 4.3 juga dapat diketahui bahwa terdapat enam daerah yang mempunyai rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita di atas lima persen dan merupakan daerah dengan laju pertumbuhan PDRB per kapita tertinggi. Keenam daerah tersebut adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kota Bandung. Dari daerah tersebut, Kota Bandung merupakan daerah dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB tertinggi yaitu mencapai 7,29 persen. Selanjutnya terdapat tujuh daerah dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita kurang dari tiga persen. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Cimahi. Dari ketujuh daerah tersebut, Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita terendah di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 0,71 persen.

Tabel 4.8 Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

No.	Kabupaten/Kota	Rata-rata Laju Pertumbuhan
1	Kab. Bogor	2.17
2	Kab. Sukabumi	3.00
3	Kab. Cianjur	3.21
4	Kab. Bandung	5.09
5	Kab. Garut	3.73
6	Kab. Tasikmalaya	4.45
7	Kab. Ciamis	4.65
8	Kab. Kuningan	5.14
9	Kab. Cirebon	5.32
10	Kab. Majalengka	4.86
11	Kab. Sumedang	3.69
12	Kab. Indramayu	1.98
13	Kab. Subang	3.96
14	Kab. Purwakarta	5.04
15	Kab. Karawang	6.49
16	Kab. Bekasi	0.71
17	Kota Bogor	3.77
18	Kota Sukabumi	4.97
19	Kota Bandung	7.29
20	Kota Cirebon	1.03
21	Kota Bekasi	2.41
22	Kota Depok	2.42
23	Kota Cimahi	2.89
24	Kota Tasikmalaya	3.77
25	Kota Banjar	4.11

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka (diolah)

Selanjutnya apabila menyinggung masalah PDRB per kapita tentunya tidak terlepas dengan faktor-faktor pembentuk PDRB sendiri. Salah satu kontributor dalam pembentukan PDRB adalah investasi. Secara umum rata-rata investasi terhadap PDRB kabupaten/kota di Jawa Barat mempunyai kecenderungan yang selalu meningkat. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata rasio antara investasi dengan PDRB setiap tahunnya. Tabel 4.9 berikut menyajikan secara lengkap rasio antara investasi dengan PDRB kabupaten/kota di Jawa Barat.

**Tabel 4.9 Rasio Investasi terhadap PDRB
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2010**

No.	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kab. Bogor	5.17	3.07	7.36	4.90	5.87	14.05	8.58
2	Kab. Sukabumi	1.76	0.48	1.98	1.41	11.27	7.55	1.49
3	Kab. Cianjur	0.00	0.00	0.00	0.49	0.17	0.00	0.00
4	Kab. Bandung	0.74	6.58	0.84	1.31	2.86	1.12	8.88
5	Kab. Garut	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Kab. Tasikmalaya	0.06	0.14	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03
7	Kab. Ciamis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
8	Kab. Kuningan	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Kab. Cirebon	5.27	0.46	0.10	7.05	0.18	29.61	50.43
10	Kab. Majalengka	0.24	0.00	1.98	1.80	0.00	0.47	5.85
11	Kab. Sumedang	0.00	5.94	0.00	1.57	29.88	1.78	0.85
12	Kab. Indramayu	0.00	0.19	0.00	0.00	1.39	0.00	1.83
13	Kab. Subang	2.69	3.87	0.62	2.14	0.55	4.80	5.48
14	Kab. Purwakarta	18.43	1.64	9.81	7.55	5.13	71.44	32.86
15	Kab. Karawang	14.50	28.69	50.88	75.11	27.22	18.70	21.16
16	Kab. Bekasi	10.83	22.44	26.55	15.51	22.92	18.09	24.73
18	Kota Bogor	0.01	0.32	0.14	0.19	5.06	0.55	3.50
19	Kota Sukabumi	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.29
20	Kota Bandung	4.11	0.71	0.79	1.41	9.98	1.47	44.67
21	Kota Cirebon	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
22	Kota Bekasi	0.98	5.89	5.31	0.63	14.96	3.74	0.86
23	Kota Depok	8.79	2.12	7.27	5.62	45.51	6.33	12.95
24	Kota Cimahi	1.96	19.56	0.09	0.82	2.00	11.21	0.70
25	Kota Tasikmalaya	0.06	0.49	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00
26	Kota Banjar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00 = tidak ada data

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Berbagai Tahun (diolah)

4.7 KONDISI AKSESIBILITAS PENDUDUK KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP INFRASTRUKTUR KESEHATAN

Rasio Jumlah dokter per seribu penduduk dan rasio banyaknya tempat tidur di rumah sakit merupakan dua indikator yang menunjukkan tingkat aksesibilitas penduduk terhadap infrastruktur di bidang kesehatan. Tabel 4.10 menyajikan jumlah dokter per seribu penduduk, yang artinya berapa banyak jumlah dokter untuk setiap seribu penduduk, sedangkan Tabel 4.11 menyajikan rasio jumlah tempat tidur di rumah sakit terhadap total penduduk kabupaten/kota di Jawa Barat.

Tabel 4.10 Rasio Jumlah Dokter per Seribu Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2010

No.	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kab. Bogor	0.062	0.062	0.060	0.044	0.066	0.062	0.060
2	Kab. Sukabumi	0.044	0.050	0.051	0.029	0.034	0.041	0.035
3	Kab. Cianjur	0.039	0.052	0.027	0.030	0.034	0.035	0.033
4	Kab. Bandung	0.045	0.018	0.028	0.024	0.042	0.045	0.035
5	Kab. Garut	0.040	0.027	0.040	0.022	0.036	0.035	0.030
6	Kab. Tasikmalaya	0.031	0.057	0.030	0.032	0.028	0.035	0.036
7	Kab. Ciamis	0.058	0.059	0.040	0.032	0.039	0.042	0.030
8	Kab. Kuningan	0.041	0.054	0.048	0.047	0.051	0.049	0.059
9	Kab. Cirebon	0.039	0.082	0.052	0.052	0.053	0.052	0.069
10	Kab. Majalengka	0.042	0.056	0.037	0.094	0.046	0.048	0.060
11	Kab. Sumedang	0.032	0.038	0.039	0.043	0.057	0.052	0.054
12	Kab. Indramayu	0.063	0.033	0.028	0.067	0.043	0.042	0.048
13	Kab. Subang	0.045	0.068	0.049	0.051	0.045	0.049	0.050
14	Kab. Purwakarta	0.072	0.080	0.098	0.095	0.088	0.077	0.088
15	Kab. Karawang	0.042	0.032	0.064	0.038	0.036	0.055	0.046
16	Kab. Bekasi	0.050	0.044	0.045	0.056	0.050	0.063	0.052
18	Kota Bogor	0.089	0.153	0.125	0.124	0.123	0.133	0.135
19	Kota Sukabumi	0.144	0.341	0.146	0.150	0.137	0.135	0.157
20	Kota Bandung	0.063	0.070	0.044	0.062	0.058	0.084	0.063
21	Kota Cirebon	0.238	0.285	0.278	0.248	0.278	0.270	0.281

22	Kota Bekasi	0.061	0.022	0.026	0.072	0.064	0.076	0.076
23	Kota Depok	0.066	0.007	0.075	0.063	0.074	0.072	0.064
24	Kota Cimahi	0.046	0.091	0.081	0.073	0.083	0.069	0.028
25	Kota Tasikmalaya	0.060	0.288	0.057	0.067	0.053	0.081	0.072
26	Kota Banjar	0.048	0.196	0.119	0.044	0.049	0.075	0.093

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Berbagai Tahun (diolah)

Dari Tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa Kota Cirebon, Kota Sukabumi dan Kota Bogor merupakan tiga daerah yang memiliki jumlah dokter per seribu penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Selama periode penelitian, 2004-2010, jumlah dokter per seribu penduduk di tiga kota ini masing-masing berkisar antara 238 hingga 285 orang untuk Kota Cirebon, 135 hingga 157 orang untuk Kota Sukabumi dan 89 hingga 153 orang dokter untuk Kota Bogor. Sebaliknya, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kota Bekasi dan Kota Depok merupakan daerah di Jawa Barat dengan jumlah dokter per seribu penduduk terendah. Kabupaten Garut memiliki kisaran 22 hingga 40 orang dokter per seribu penduduk, Kabupaten Bandung memiliki rentang antara 18 hingga 45 orang dokter, Kota Bekasi berkisar antara 22 hingga 76 orang, sedangkan Kota Depok berkisar antara 7 hingga 75 orang dokter.

Pada tahun 2010, rata-rata jumlah dokter untuk setiap seribu penduduk di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat adalah sebanyak 70 dokter. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap seribu orang penduduk akan dilayani oleh 70 orang dokter, baik itu dokter pada rumah sakit maupun dokter pada puskesmas. Kota Cirebon merupakan daerah dengan tingkat aksesibilitas terhadap dokter yang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena untuk setiap seribu orang penduduk terdapat 281 orang dokter yang siap melayani. Sebaliknya, Kota Cimahi merupakan daerah dengan tingkat aksesibilitas yang cukup rendah, karena untuk seribu orang penduduk hanya dilayani oleh sebanyak 28 orang dokter.

Demikian halnya dengan rasio jumlah tempat tidur di seluruh rumah sakit terhadap total penduduk sebagai representasi aksesibilitas penduduk terhadap infrastruktur kesehatan. Pada tahun 2010, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur merupakan dua daerah yang mempunyai rasio terendah. Satu tempat tidur rumah sakit yang ada di Kabupaten Bandung diperuntukkan bagi sekitar 5688 orang, kemudian satu tempat tidur di Kabupaten Cianjur diperuntukkan bagi sekitar 5582 orang. Sedangkan Kota Sukabumi, Kota Bandung dan Kota Cirebon merupakan tiga daerah di Jawa Barat dengan aksesibilitas terhadap infrastruktur relative mudah. Hal ini tampak dari rasio antara jumlah tempat tidur rumah sakit terhadap penduduk yang tinggi. Satu tempat

tidur rumah sakit yang ada di Kota Cirebon hanya diperuntukkan bagi sekitar 323 orang, satu tempat tidur rumah sakit yang ada di Kota Sukabumi diperuntukkan bagi sekitar 360 orang, sedangkan satu tempat tidur rumah sakit yang ada di Kota Bandung diperuntukkan bagi sekitar 514 orang. Semakin banyak jumlah penduduk yang harus dilayani, menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitas penduduk terhadap infrastruktur kesehatan ini semakin sulit.

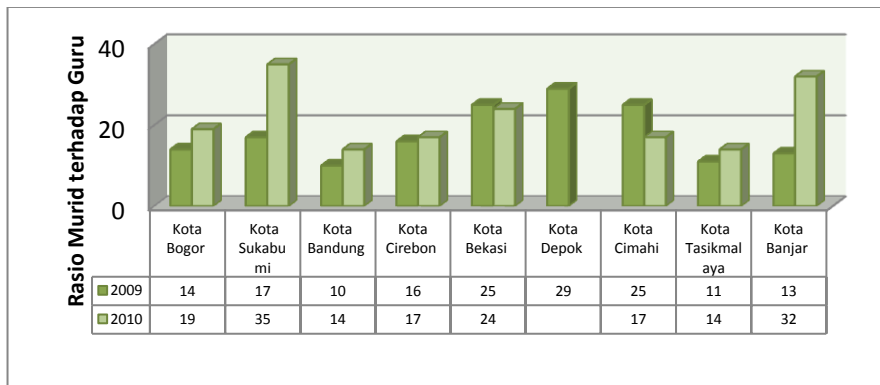
Tabel 4.11 Rasio Total Penduduk terhadap Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

No.	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kab. Bogor	5383	4467	5212	4567	4658	4494	3413
2	Kab. Sukabumi	9365	5150	6750	7428	7490	7146	4151
3	Kab. Cianjur	9080	8781	7644	6020	6078	10947	5582
4	Kab. Bandung*	6009	7036	6460	5931	4079	3831	5688
5	Kab. Garut	6629	6108	5303	5422	5539	6678	4511
6	Kab. Ciamis	18802	5692	5016	7309	7400	5730	3738
7	Kab. Kuningan	2502	2031	2115	2309	2355	2557	1698
8	Kab. Cirebon	4237	3718	2658	2887	2927	3544	1895
9	Kab. Majalengka	4758	4210	3018	4042	4063	4671	3668
10	Kab. Sumedang	4556	4374	4176	4182	4264	4522	3837
11	Kab. Indramayu	11071	8981	9073	7512	7581	5935	3714
12	Kab. Subang	4937	3896	3793	4421	4474	5126	3345
13	Kab. Purwakarta	3820	3723	2843	3106	3152	2512	950
14	Kab. Karawang	2891	2347	2177	3001	3057	1958	1612
15	Kab. Bekasi	3723	2706	2623	2784	2844	2658	1500
16	Kota Bogor	577	536	534	652	660	660	552
17	Kota Sukabumi	573	419	552	547	556	622	360
18	Kota Bandung	557	533	519	539	545	553	514
19	Kota Cirebon	383	355	418	341	351	381	323
20	Kota Bekasi	1720	1194	1054	1289	1315	1054	821
21	Kota Depok	2138	1505	1322	1777	1800	1487	1277
22	Kota Cimahi	580	837	452	716	734	579	519
23	Kota Tasikmalaya	1455	539	1029	1298	1324	1331	975
24	Kota Banjar	1043	975	995	738	753	916	621

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka (berbagai tahun)

4.8 KONDISI AKSESIBILITAS PENDUDUK KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN

Untuk melihat seberapa besar tingkat aksesibilitas penduduk terhadap infrastruktur bidang pendidikan digunakan *proxy* rasio jumlah murid terhadap jumlah guru setingkat SLTA dan rasio jumlah sekolah negeri setingkat SLTA terhadap total penduduk. Secara umum pada tahun 2009 dan 2010 rasio jumlah murid terhadap jumlah guru yang ada di seluruh Kota di Jawa Barat menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini berarti bahwa untuk setiap guru akan menghadapi jumlah murid yang lebih banyak, hal ini tentu saja akan membuat tingkat aksesibilitas murid setingkat SLTA terhadap guru menjadi lebih rendah. Hanya Kota Bekasi dan Kota Cimahi saja yang rasionya mengalami penurunan. Dengan demikian setiap guru yang terdapat di Kota Bekasi dan Kota Cimahi akan menghadapi lebih sedikit murid, yang berarti pula tingkat aksesibilitas murid terhadap guru tersebut lebih tinggi. Di Kota Bekasi pada tahun 2009 rasio murid terhadap guru SLTA adalah sebesar 25. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap satu orang guru SLTA dan sederajat akan menghadapi 25 orang murid, sedangkan pada tahun 2010, rasionya menjadi 24, yang berarti bahwa untuk setiap satu orang guru SLTA dan sederajat akan menghadapi 25 orang murid SLTA dan sederajat. Grafik 4.3 menunjukkan rasio jumlah murid terhadap jumlah guru untuk seluruh daerah kota di Jawa Barat.



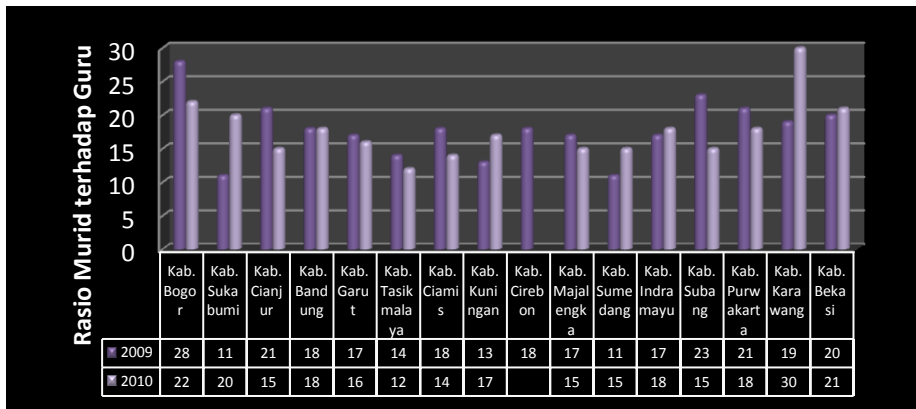
Grafik 4.3 Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Guru Setingkat SLTA Daerah Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2010

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka (berbagai tahun)

Untuk daerah kabupaten, terdapat delapan daerah yang rasio antara jumlah murid terhadap jumlah guru pada tahun 2009-2010 menurun, satu daerah yaitu Kabupaten Bandung mempunyai rasio yang tetap, enam daerah justru meningkat dan satu daerah lainnya yaitu Kabupaten Cirebon tidak tersedia datanya. Grafik 4.4 menyajikan secara lengkap rasio antara jumlah murid terhadap guru untuk tingkat SLTA di daerah kabupaten se Jawa Barat.

Delapan daerah dengan rasio yang semakin menurun menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitas murid terhadap guru menjadi lebih tinggi, yang berarti setiap guru akan menghadapi lebih sedikit murid. Kedelapan daerah tersebut adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Bogor pada tahun 2010 mempunyai rasio 22 (lebih kecil dibandingkan dengan rasio pada tahun 2009 yang sebesar 28). Hal ini berarti bahwa setiap guru SLTA yang terdapat di Kabupaten Bogor harus menghadapi 22 orang murid SLTA atau sederajat. Untuk Kabupaten Majalengka pada tahun 2010 mempunyai rasio sebesar 15. Dengan demikian pada tahun 2010, untuk setiap guru SLTA atau sederajat harus melayani murid SLTA dan sederajat sebanyak 15 orang.

Daerah-daerah dengan tingkat aksesibilitas murid terhadap guru yang menjadi lebih rendah diantaranya adalah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Kabupaten Sukabumi pada tahun 2010 mempunyai rasio 20. Hal ini berarti bahwa setiap guru SLTA yang terdapat di Kabupaten Sukabumi harus menghadapi 20 orang murid SLTA atau sederajat. Untuk Kabupaten Bekasi pada tahun 2010 mempunyai rasio sebesar 21. Dengan demikian pada tahun 2010, untuk setiap guru SLTA atau sederajat harus melayani murid SLTA dan sederajat sebanyak 21 orang.



Grafik 4.4 Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Guru Setingkat SLTA Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2010

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka (berbagai tahun)

Demikian halnya dengan tingkat aksesibilitas penduduk terhadap infrastruktur pendidikan yang dalam hal ini direpresentasikan oleh jumlah sekolah SLTA dan SMK. Untuk daerah kota, pada tahun 2009-2010 secara umum menunjukkan adanya suatu penurunan rasio. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur pendidikan ini semakin baik. Kota Bogor misalnya, rasio total penduduk terhadap jumlah SLTA dan SMK pada tahun 2009 adalah sebesar 63,971 dan pada tahun 2010 menjadi 63,356. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap satu SLTA atau SMK pada tahun 2009 diakses oleh 63,971 orang, sedangkan pada tahun 2010 jumlah penduduk yang mengakses SLTA ataupun SMK adalah sebanyak 63,356 orang. Dengan adanya penurunan rasio ini menunjukkan adanya penambahan jumlah SLTA ataupun SMK di Kota Bogor.

Kota Bekasi dan Kota Depok merupakan dua daerah yang mempunyai tingkat aksesibilitas penduduk terhadap infrastruktur pendidikan menurun dari tahun 2009 ke tahun 2010. Hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh dua kemungkinan, *pertama* jumlah penduduk di dua daerah ini yang semakin meningkat tanpa adanya penambahan jumlah SLTA ataupun SMK dan *kedua* adanya penurunan jumlah SLTA dan SMK atau *disfungsi* SLTA maupun SMK di dua daerah ini. Rasio total penduduk terhadap jumlah SLTA dan SMK pada tahun 2009 di Kota Bekasi adalah sebesar 98,943 dan pada tahun 2010 menjadi 106,131. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap SLTA atau SMK pada tahun 2009 diakses oleh 98,943 orang, sedangkan pada tahun 2010 jumlah penduduk yang mengakses SLTA ataupun SMK adalah sebanyak 106,131 orang. Untuk Kota Depok, rasio total penduduk terhadap jumlah SLTA dan SMK

pada tahun 2009 adalah sebesar 162,870 dan pada tahun 2010 menjadi 289,762. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap SLTA atau SMK pada tahun 2009 diakses oleh 162,870 orang, sedangkan pada tahun 2010 jumlah penduduk yang mengakses SLTA ataupun SMK adalah bertambah hingga menjadi 289,762 orang.

Tabel 4.12 Rasio Total Penduduk terhadap Jumlah SLTA dan SMK Daerah Kota di Provinsi Jawa Barat

No.	Kabupaten/Kota	2009	2010
1	Kota Bogor	63971	63356
2	Kota Sukabumi	38945	33187
3	Kota Bandung	57493	50955
4	Kota Cirebon	27650	26944
5	Kota Bekasi	98943	106131
6	Kota Depok	162870	289762
7	Kota Cimahi	60874	60131
8	Kota Tasikmalaya	49256	48882
9	Kota Banjar	30999	25022

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Berbagai Tahun (diolah)

Sama halnya dengan daerah kota, pada tahun 2009-2010 secara umum di daerah kabupaten pun menunjukkan adanya suatu penurunan rasio total penduduk terhadap jumlah SLTA dan SMK. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitas masyarakat kabupaten terhadap infrastruktur pendidikan ini semakin baik. Kabupaten Garut misalnya, rasio total penduduk terhadap jumlah SLTA dan SMK pada tahun 2009 adalah sebesar 62,606 dan pada tahun 2010 menjadi 60,103. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap satu SLTA ataupun SMK pada tahun 2009 diakses oleh 62,606 orang, sedangkan pada tahun 2010 jumlah penduduk yang mengakses SLTA ataupun SMK adalah sebanyak 60,103 orang. Dengan adanya penurunan rasio ini menunjukkan adanya dua kemungkinan, *pertama* adanya penambahan jumlah SLTA ataupun SMK di Kota Bogor ataupun *kedua* berkurangnya jumlah penduduk di Kabupaten Garut.

Kemudian terdapat enam daerah yang dari tahun 2009 hingga 2010 memiliki rasio yang meningkat yang berarti bahwa tingkat aksesibilitas penduduk terhadap infrastruktur pendidikan menurun. Keenam daerah tersebut diantaranya adalah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang,

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bekasi. Dari enam daerah ini, Kabupaten Cianjur merupakan daerah dengan penurunan tingkat aksesibilitas penduduk terhadap infrastruktur pendidikan terbesar dibandingkan dengan daerah lainnya. Hanya berselang satu tahun, penurunan aksesibilitas yang terjadi mencapai 34,303. Dengan kata lain dari yang awalnya satu SLTA ataupun SMK dapat diakses oleh 64,392 orang pada tahun 2009, pada tahun 2010 harus diakses oleh 98,695 orang penduduk di Kabupaten Cianjur. Tabel 4.7 berikut menyajikan secara lengkap rasio jumlah penduduk terhadap jumlah SLTA dan SMK di daerah kabupaten di Jawa Barat.

Tabel 4.13 Rasio Total Penduduk terhadap Jumlah SLTA dan SMK Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat

No.	Kabupaten/Kota	2009	2010
1	Kab. Bogor	120376	119298
2	Kab. Sukabumi	71679	73169
3	Kab. Cianjur	64392	98695
4	Kab. Bandung*	111843	111639
5	Kab. Garut	62606	60103
6	Kab. Tasikmalaya	109421	93093
7	Kab. Ciamis	52121	47891
8	Kab. Kuningan	45136	39830
9	Kab. Cirebon	88447	82688
10	Kab. Majalengka	55416	40223
11	Kab. Sumedang	52000	49709
12	Kab. Indramayu	55390	66549
13	Kab. Subang	67655	73258
14	Kab. Purwakarta	48177	50148
15	Kab. Karawang	82092	81838
16	Kab. Bekasi	48207	59782

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Berbagai Tahun (diolah)

BAB V

KORELASI ANTARA DERAJAT DESENTRALISASI DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian ini menggunakan data panel, dengan unit analisis seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya untuk menganalisis korelasi antara derajat desentralisasi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam penelitian ini dilakukan serangkaian regresi berganda (*multiple regression*) dengan tiga variabel independent yang merupakan *proxy* dari derajat desentralisasi, dengan masing-masing enam variabel dependen yang merupakan indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yang meliputi indikator bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Selain variabel independent yang menjadi fokus penelitian tersebut, dalam penelitian ini juga digunakan variabel kontrol berupa variabel investasi dan tenaga kerja yang dimaksudkan untuk melihat determinan lain di luar variabel desentralisasi yang disinyalir memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

5.1 HASIL ESTIMASI

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat tiga teknik estimasi model regresi data panel yang dapat digunakan yaitu model dengan PLS (*Common Effect*), model *Fixed Effect* dan model *Random Effect*. Dalam penelitian ini, ketiga teknik estimasi tersebut dibuat semua untuk selanjutnya dilakukan uji untuk menentukan teknik estimasi mana yang paling tepat. Selanjutnya, berikut ini disajikan ketiga hasil estimasi tersebut.

5.1.1 Estimasi Dengan Pendekatan PLS (*Common Effect*)

Teknik estimasi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah dengan menggunakan metode PLS atau yang juga dikenal dengan *Common Effect*. Pendekatan PLS tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Di sini digunakan asumsi bahwa perilaku data antar unit analisis, berupa kabupaten dan kota, memiliki kesamaan dalam berbagai kurun waktu. Lebih lanjut, hasil regresi PLS ditunjukkan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1 Hasil Regresi PLS

Variabel Dependent	Variabel Independent			Variabel Kontrol		R²
	Desentralisasi Fiskal	Desentralisasi Fungsional	Desentralisasi Personnel	Investasi	Tenaga Kerja	
PDRB per kapita	51.12054*	17.59245	-3975.563*	129.9628***	71.11486***	0.120099
Panjang Jalan per kapita	0.000158	-0.000124	-0.257653***	-0.000710*	0.001552***	0.307635
Jumlah Gedung Sekolah SLTA	-14.76203	-448.7142**	12526.50	1803.278***	610.6346***	0.094536
Rasio Murid dan Guru tingkat SLTA	0.161725	-0.037405	-0.25.78469	-0.030311	0.289502***	0.004175
Jumlah dokter per 1000 penduduk	0.000567*	-0.000162	-0.155716***	-0.000170	0.001294***	0.146739
Jumlah tempat tidur per 1,000,000 penduduk	-25.22147*	-12.55769*	8700.701***	-27.46956*	12.89189***	0.322758

Catatan: * p < 0.1; ** p < 0.05; dan *** p < 0.01

Sumber: Hasil Estimasi (Lampiran 1)

5.1.2 Estimasi Dengan Pendekatan *Fixed Effect*

Pada pendekatan yang pertama digunakan asumsi bahwa intersep dan slope adalah sama baik antar waktu maupun antar unit analisis kabupaten/kota. Namun demikian, penggunaan asumsi ini sebenarnya kurang realistis mengingat adanya perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota baik dilihat dari potensi sumber daya alam, karakteristik sosial budaya penduduk, maupun karakteristik manajemen pemerintahan. Oleh karenanya, berbagai perbedaan karakteristik ini semestinya diakomodasi dalam model. Salah satu caranya adalah dengan merubah asumsi bahwa intersep adalah berbeda antar unit analisis kabupaten/kota sedangkan slope antar unit analisis kabupaten/kota tetap sama. Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep di dalam persamaan tersebut dikenal dengan model regresi *Fixed Effect*. Adapun hasil regresi *Fixed Effect* ditunjukkan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2 Hasil Regresi Fixed Effect

<i>Variabel Dependent</i>	<i>Koefisien</i>	<i>Variabel Independent</i>			<i>Variabel Kontrol</i>		<i>R²</i>
		Desentralisasi Fiskal	Desentralisasi Fungsional	Desentralisasi Personnel	Investasi	Tenaga Kerja	
<i>PDRB per kapita</i>	4350,448***	-3.125224	-1.917685	799.3844	30.45513***	20.15609***	0.160517
<i>Panjang Jalan per kapita</i>	0.072193**	4.26E-06	8.50E-06	-0.137906**	-0.000116	0.000290	0.047097
<i>Jumlah Gedung Sekolah SLTA</i>	-65260.80	41.87001	-527.6597**	32323.72	2085.952***	1255.161*	0.112699
<i>Rasio Murid dan Guru tingkat SLTA</i>	62.10996	0.106361	-0.015840	-32.38579	-0.174260	-0.369508	0.020052
<i>Jumlah dokter per 1000 penduduk</i>	0.162822***	0.000141	-9.91E-05	-0.127155***	-3.33e-05	-0.000596*	0.232036
<i>Jumlah tempat tidur per 1,000,000 penduduk</i>	-122.5091	-14.24296	-2.012269	8483.833***	-11.19679	11.55429	0.305114

Catatan: * p < 0.1; ** p < 0.05; dan *** p < 0.01

Sumber: Hasil Estimasi (Lampiran 2)

5.1.3 Estimasi Dengan Pendekatan *Random Effect*

Pada pendekatan ini, digunakan variabel residual yang menganggap bahwa residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Asumsi yang digunakan dalam pendekatan ini adalah bahwa intersep adalah variabel random atau stokastik. Metode yang tepat digunakan untuk mengestimasi model *Random Effect* adalah *Generalized Least Squares* (GLS). Adapun hasil regresi *Random Effect* ditunjukkan pada tabel 5.3.

Tabel 5.3 Hasil Regresi Random Effect

<i>Variabel Dependent</i>	<i>Koefisien</i>	<i>Variabel Independent</i>			<i>Variabel Kontrol</i>		<i>R²</i>
		Desentralisasi Fiskal	Desentralisasi Fungsional	Desentralisasi Personnel	Investasi	Tenaga Kerja	
<i>PDRB per kapita</i>	4033.835***	-3.458544	-1.936252	1612.280	29.82069***	21.11355***	0.982458
<i>Panjang Jalan per kapita</i>	-0.008890	-1.44E-05	3.44E-05	0.063108	-5.49E-05	0.000486	0.886199
<i>Jumlah Gedung Sekolah SLTA</i>	-288385.0**	-3.370697	-520.3765**	580396.7**	2304.431***	1754.948**	0.347784
<i>Rasio Murid dan Guru tingkat SLTA</i>	99.13308	-0.055260	-0.057271	-179.0147	-0.194527	-0.232580	0.148431
<i>Jumlah dokter per 1000 penduduk</i>	0.108354**	0.000111	-8.55E-05	0.003531	3.44E-05	-0.000448	0.796001
<i>Jumlah tempat tidur per 1,000,000 penduduk</i>	1868.388	-12.44986	-0.770172	4832.916	-8.093969	1.154147	0.800939

Catatan: * $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; dan *** $p < 0.01$

Sumber: Hasil Estimasi (Lampiran 3)

Setelah melakukan estimasi dengan ketiga pendekatan tersebut di atas, selanjutnya akan ditentukan, pendekatan manakah yang paling tepat untuk digunakan. Untuk keperluan ini, penelitian ini akan menggunakan 3 (tiga) macam uji yaitu: a) *Uji Chow*, digunakan untuk memilih antara metode OLS tanpa variabel dummy atau *Fixed Effect*; b) *Uji Hausman*, digunakan untuk memilih antara *Fixed Effect* atau *Random Effect*; dan c) *Uji Langrange Multiplier (LM)* digunakan untuk memilih antara OLS tanpa variabel dummy atau *Random Effect*. Adapun hasil ketiga uji tersebut dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut.

Tabel 5.4 Kompilasi Hasil Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM

<i>Model</i>	<i>Hasil Uji</i>			<i>Kesimpulan</i>
	<i>Chow Test</i>	<i>Hausman Test</i>	<i>LM Test</i>	
<i>Model 1</i>	0.0000 (Fixed Effect)	0.0809 (Random Effect)	0.0000 (Random Effect)	<i>Random Effect</i>
<i>Model 2</i>	0.0000 (Fixed Effect)	0.0063 (Fixed Effect)	0.0000 (Random Effect)	<i>Fixed Effect</i>
<i>Model 3</i>	0.0050 (Fixed Effect)	0.1141 (Random Effect)	0.0008 (Random Effect)	<i>Random Effect</i>
<i>Model 4</i>	0.6703 (OLS/Common Effect)	0.5091 (Random Effect)	0.5098 (OLS/Common Effect)	<i>OLS/Common Effect</i>
<i>Model 5</i>	0.0000 (Fixed Effect)	0.1470 (Random Effect)	0.0000 (Random Effect)	<i>Random Effect</i>
<i>Model 6</i>	0.0000 (Fixed Effect)	0.0025 (Fixed Effect)	0.0000 (Random Effect)	<i>Fixed Effect</i>

Sumber: Hasil Estimasi (Lampiran)

5.2 HASIL ANALISIS

Sub bagian ini akan menjelaskan tentang hasil analisis terhadap keseluruhan model yang ada dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji sebagaimana terlihat pada tabel 5.4, maka selanjutnya untuk kemudahan proses analisis akan mengacu pada tabel 5.5.

Tabel 5.5 Kompilasi Kesesuaian Model Yang Digunakan

<i>Variabel Dependent</i>	<i>Koefisien</i>	<i>Variabel Independent</i>			<i>Variabel Kontrol</i>		<i>R²</i>
		Desentralisasi Fiskal	Desentralisasi Fungsional	Desentralisasi Personnel	Investasi	Tenaga Kerja	
Model 1	4033.835***	-3.458544	-1.936252	1612.280	29.82069***	21.11355***	0.982458
<i>Model 2</i>	0.072193**	4.26E-06	8.50E-06	-0.137906**	-0.000116	0.000290	0.047097
<i>Model 3</i>	-288385.0**	-3.370697	-520.3765**	580396.7**	2304.431***	1754.948**	0.347784
<i>Model 4</i>		0.161725	-0.037405	-0.25.78469	-0.030311	0.289502***	0.004175
Model 5	0.108354**	0.000111	-8.55E-05	0.003531	3.44E-05	-0.000448	0.796001
<i>Model 6</i>	-122.5091	-14.24296	-2.012269	8483.833***	-11.19679	11.55429	0.305114

Catatan: * p < 0.1; ** p < 0.05; dan *** p < 0.01

Model 1, 3, 5 menggunakan *Random Effect*, Model 2 dan 6 menggunakan *Fixed Effect*, dan Model 4 menggunakan *OLS/Common Effect*.

Sumber: Hasil Estimasi (Lampiran)

5.2.1 Analisis Model 1

Dari Tabel 5.5, terlihat bahwa korelasi antara derajat desentralisasi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi tidak ada. Hal ini terlihat dari tidak adanya variabel desentralisasi yang signifikan mempengaruhi variabel ekonomi wilayah yang diwakili oleh variabel PDRB per kapita. Dan bila dilihat dari keberadaan variabel kontrol, maka terlihat jelas bahwa baik variabel investasi maupun variabel tenaga kerja mempunyai koefisien yang signifikan secara statistik dengan uji t pada $\alpha = 1\%$ dan memiliki tanda/sign positif. Ini berarti bahwa perubahan pada kedua variabel kontrol tersebut memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian wilayah. Tingginya pengaruh variabel investasi dan variabel tenaga kerja ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Berdasarkan teori Fungsi Produksi Neo Klasik, tenaga kerja merupakan salah satu faktor input, selain modal, yang menentukan produktifitas. Pada skala makro, tenaga kerja merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, karena tenaga kerja akan menghasilkan pendapatan, dan pendapatan yang dihasilkan setiap individu tenaga kerja ini disebut sebagai pendapatan per kapita. Selain itu, tenaga kerja akan mempengaruhi pertumbuhan produksi, dimana peningkatan marginal jumlah tenaga kerja akan meningkatkan marginal produksi. Dan peningkatan marginal produksi akan terus bertambah jika jumlah tenaga kerja terus bertambah hingga mencapai jumlah produksi maksimal.
- Investasi, baik yang berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diyakini merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pengungkit (*leverag*e) pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan investasi akan menambah jumlah barang modal yang selanjutnya menentukan produktifitas.

Selanjutnya, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.98258 berarti model 1 mampu menjelaskan variasi kemajuan pertumbuhan bidang ekonomi sebesar 98,26%, namun demikian, pengaruh ini tidak berasal dari variabel desentralisasi.

5.2.2 Analisis Model 2

Dari tabel 5.5 juga terlihat bahwa hanya variabel desentralisasi personil yang memiliki koefisien yang signifikan melalui uji t pada $\alpha = 5\%$. Variabel ini bertanda negatif, artinya bahwa bila terjadi peningkatan rasio PNS daerah terhadap PNS pusat sebesar satu unit maka akan terjadi penurunan rasio panjang jalan yang berkualitas baik. Hal ini

kemungkinan besar disebabkan oleh besarnya jumlah PNS yang direkrut oleh daerah setiap tahun sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi. Akibatnya saat ini terjadi pembengkakan anggaran rutin yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan PNS daerah, sementara anggaran pembangunan infrastruktur jalan menjadi terkendala. Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat tergolong tinggi, sehingga dengan minimnya pembangunan jalan yang dilakukan dalam kurun 6 tahun terakhir, maka rasio panjang jalan berkualitas baik per penduduk semakin kecil. Selanjutnya, bila dilihat dari koefisien determinasi (R^2) yang sangat kecil, yaitu sebesar 0.047097, maka dapat dikatakan bahwa model 2 hanya mampu menjelaskan variasi pertumbuhan infrastruktur jalan berkualitas baik sebesar 5%. Ini berarti bahwa sekitar 95% variasi pertumbuhan infrastruktur jalan berkualitas baik dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat di dalam model ini.

5.2.3 Analisis Model 3

Tabel 5.5 juga menjelaskan bahwa terdapat dua variabel desentralisasi yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap aksesibilitas masyarakat pada bidang pendidikan tingkat menengah ke atas yang diwakili oleh variabel jumlah gedung sekolah SLTA per penduduk. Kedua variabel desentralisasi dimaksud adalah *variabel desentralisasi fungsional*, yang didekati dengan variabel rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah secara nasional, dan *variabel desentralisasi personil* yang diwakili oleh variabel rasio PNS daerah terhadap PNS pusat. Adapun tingkat signifikansi kedua variabel ini adalah pada tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$. Namun demikian, kedua variabel ini memiliki pengaruh yang berbeda.

Variabel desentralisasi fungsional bertanda *negatif*, artinya, peningkatan rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah secara nasional sebesar 1 unit akan mempengaruhi penurunan rasio jumlah sekolah SLTA per penduduk. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Karena variabel dependen pada model ini berbentuk rasio atau perbandingan maka penurunan rasio jumlah sekolah SLTA per penduduk dapat disebabkan oleh beberapa faktor, *pertama*, jumlah sekolah SLTA tetap sementara jumlah penduduk meningkat; *kedua*, jumlah sekolah SLTA dan jumlah penduduk sama-sama mengalami peningkatan tapi dengan laju pertumbuhan yang berbeda, dimana laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan jumlah sekolah SLTA. Untuk konteks Provinsi Jawa Barat, penjelasan kedua tersebut disinyalir merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan rasio jumlah sekolah SLTA per

penduduk. Selain dikarenakan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat yang tergolong tinggi yaitu 1,89 persen pada tahun 2010 yang diakibatkan oleh arus urbanisasi maupun karena pertumbuhan alamiah berupa tingkat kelahiran (*natalitas*). Di sisi lain, laju pertambahan jumlah sekolah SLTA di Provinsi Jawa Barat tidak terlalu banyak. Hal ini disebabkan oleh karena pemerintah daerah sesungguhnya lebih banyak terfokus pada pengembangan pendidikan tingkat dasar (SD) dan pendidikan tingkat menengah pertama (SMP) yang merupakan bagian dari program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan secara nasional dibandingkan pembangunan sekolah tingkat SLTA.

Variabel desentralisasi personil bertanda *positif*, artinya, peningkatan rasio PNS daerah terhadap PNS pusat sebesar 1 unit akan mempengaruhi peningkatan rasio jumlah sekolah per penduduk. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: di era desentralisasi, pemerintah daerah banyak yang melakukan rekrutmen PNS, termasuk di dalamnya adalah rekrutmen tenaga pengajar atau guru di tingkat SLTA. Sebagai akibat dari banyaknya tenaga pengajar/guru ini selanjutnya pemerintah membangun fasilitas pendidikan berupa gedung sekolah, sehingga rasio jumlah sekolah per penduduk mengalami peningkatan.

Sementara, kedua variabel kontrol, yaitu variabel investasi dan tenaga kerja, masing-masing bertanda *positif* dan secara statistik signifikan melalui uji t pada $\alpha = 1\%$ dan $\alpha = 5\%$ secara berurutan. Ini berarti bahwa perubahan pada kedua variabel ini memiliki pengaruh terhadap perubahan rasio jumlah sekolah per penduduk. Hal ini karena peningkatan investasi ini juga mencakup investasi di sektor pendidikan, yang akibatnya *demand* terhadap tenaga pengajar/guru untuk tingkat SLTA juga meningkat. Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0.347784 berarti model mampu menjelaskan variasi rasio jumlah sekolah SLTA per penduduk sebesar 34,78%.

5.2.4 Analisis Model 4

Berbeda dengan kelima model lainnya, setelah melalui serangkaian test, pendekatan yang paling cocok untuk model 4 adalah menggunakan metode OLS atau *Common Effect*. Sebagaimana terlihat pada tabel 5.5, tidak ada satupun variabel desentralisasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio murid dan guru tingkat SLTA. Hanya saja variabel tenaga kerja yang merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini, memiliki signifikansi pada $\alpha = 1\%$. Sama halnya dengan penjelasan pada model 3, ketidak-signifikan variabel desentralisasi pada model ini disebabkan oleh karena pemerintah daerah lebih banyak terfokus pada pengembangan pendidikan tingkat dasar (SD) dan pendidikan tingkat menengah pertama (SMP) yang merupakan bagian

dari program wajib belajar 9 tahun. Sampai dengan saat ini, pemerintah daerah banyak melakukan rekrutmen guru untuk tingkat SD dan SLTA selain juga melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal kesejahteraan guru di tingkat ini. Sebenarnya, rekrutmen guru pada tingkat SLTA tetap dilakukan hanya saja jumlahnya tidak sebanyak pada tingkat SD dan SMP. Selanjutnya, bila dilihat dari koefisien determinasi (R^2) yang sangat kecil, yaitu sebesar 0.004175, maka dapat dikatakan bahwa model 4 hanya mampu menjelaskan variasi rasio murid dan guru tingkat SLTA sebesar 0.4%. Ini berarti bahwa sekitar 99.6% variasi rasio murid dan guru tingkat SLTA dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat di dalam model ini.

5.2.5 Analisis Model 5

Sama halnya dengan model 4, dalam model 5, ditemukan bahwa variabel desentralisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan rasio jumlah dokter per 1000 penduduk. Selanjutnya, bila dilihat dari koefisien determinasi (R^2) yaitu sebesar 0.796001, maka dapat dikatakan bahwa meskipun variabel-variabel pada model 5 tidak signifikan, namun secara bersamaan, model ini mampu menjelaskan variasi rasio dokter per 1000 penduduk sebesar 79.60%. Ini berarti hanya sekitar 20.40% variasi rasio dokter per 1000 penduduk dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat di dalam model ini.

5.2.6 Analisis Model 6

Sementara itu, untuk model 6, variabel desentralisasi personel bertanda positif dan secara statistik signifikan melalui uji t pada $\alpha = 1\%$. Ini berarti bahwa apabila terjadi peningkatan rasio PNS daerah terhadap PNS pusat sebesar 1 unit akan mempengaruhi peningkatan rasio jumlah tempat tidur di Rumah Sakit per 1.000.000 penduduk. Selanjutnya, bila dilihat dari koefisien determinasi (R^2) yaitu sebesar 0.305114, maka dapat dikatakan bahwa model 6 hanya mampu menjelaskan variasi rasio jumlah tempat tidur di Rumah Sakit per 1.000.000 penduduk sebesar 30.51%.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana telah disampaikan pada Bab V, maka beberapa kesimpulan yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

- **Di bidang ekonomi**, variabel desentralisasi belum menunjukkan pengaruhnya secara langsung, baik dilihat dari variabel *desentralisasi fiskal*, *desentralisasi fungsional* maupun *desentralisasi personnel*. Hal ini terlihat dari tidak adanya koefisien dari variabel desentralisasi yang signifikan mempengaruhi variabel ekonomi wilayah yang diwakili oleh variabel PDRB per kapita. Adapun determinan yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah dijelaskan oleh keberadaan variabel kontrol, yaitu *variabel investasi* maupun *variabel tenaga kerja* dimana masing-masing variabel memiliki signifikansi secara statistik dengan uji t pada $\alpha = 1\%$ dan memiliki tanda/sign positif. Ini berarti bahwa pada kondisi *ceteris paribus*, peningkatan rasio investasi terhadap PDRB dan peningkatan rasio tenaga kerja terhadap angkatan kerja sebesar 1 unit, masing-masing akan mengakibatkan peningkatan PDRB per kapita sebesar nilai koefisiennya sebagaimana terlihat pada model 1. Signifikansi dan besarnya pengaruh variabel investasi dan variabel tenaga kerja ini dapat dijelaskan oleh teori Fungsi Produksi Neo Klasik dimana baik modal (investasi) dan tenaga kerja merupakan faktor input yang menentukan produktifitas. Terkait dengan hal ini, meskipun tidak ada keterkaitan langsung antara ketiga variabel desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi, namun disinyalir terdapat keterkaitan tidak langsung variabel ini melalui saluran (*channel*) investasi, dimana tingginya investasi di daerah dijustifikasi sebagai bentuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menarik investasi. Selanjutnya, bila dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2), sebesar 0.98258, menunjukkan bahwa model 1 mampu menjelaskan variasi kemajuan pertumbuhan bidang ekonomi daerah sebesar 98,26%, namun demikian, pengaruh ini tidak berasal dari variabel desentralisasi, tetapi berasal dari variabel investasi dan variabel tenaga kerja.
- **Di bidang infrastruktur**, hanya *variabel desentralisasi personil* yang memiliki pengaruh terhadap perubahan variabel infrastruktur

jalan. Namun demikian, pengaruh yang ditunjukkan oleh variabel desentralisasi personil adalah negatif. Ini berarti bahwa bila terjadi peningkatan rasio PNS daerah terhadap PNS pusat sebesar satu unit maka akan terjadi penurunan rasio panjang jalan yang berkualitas baik sebesar nilai koefisiennya. Disinyalir, hal ini disebabkan oleh karena pasca pemberlakuan kebijakan desentralisasi, daerah-daerah mulai melakukan *recruitmen* PNS setiap tahunnya. Akibatnya jumlah PNS daerah semakin banyak dan menyebabkan pembengkakan kebutuhan anggaran rutin untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS daerah. Hal ini selanjutnya berimplikasi pada semakin menurunnya anggaran pembangunan infrastruktur jalan. Sementara itu, di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat tergolong tinggi, sehingga dengan minimnya pembangunan jalan yang dilakukan dalam kurun 6 tahun terakhir, maka rasio panjang jalan berkualitas baik per penduduk semakin kecil. Selanjutnya, bila dilihat dari koefisien determinasi (R^2) yang sangat kecil, yaitu sebesar 0.047097, maka dapat dikatakan bahwa model 2 hanya mampu menjelaskan variasi pertumbuhan infrastruktur jalan berkualitas baik sebesar 5%. Ini berarti bahwa sekitar 95% variasi pertumbuhan infrastruktur jalan berkualitas baik dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat di dalam model 2.

- **Di bidang Pendidikan**, terdapat dua variabel desentralisasi yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap aksesibilitas masyarakat pada bidang pendidikan tingkat menengah ke atas. Kedua variabel desentralisasi dimaksud adalah *variabel desentralisasi fungsional* dan *variabel desentralisasi personil*. Namun demikian, kedua variabel ini memiliki pengaruh yang berbeda yang ditunjukkan oleh koefisien variabel desentralisasi fungsional yang bertanda *negatif* dan koefisien variabel desentralisasi personil yang bertanda *positif*. Tanda negatif dari variabel desentralisasi fungsional ini menunjukkan bahwa bila terjadi peningkatan rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah secara nasional sebesar 1 unit akan menyebabkan terjadinya penurunan rasio jumlah sekolah SLTA per penduduk sebesar koefisiennya. Sementara itu, tanda positif dari variabel desentralisasi personil menunjukkan bahwa bila terjadi peningkatan rasio PNS daerah terhadap PNS pusat sebesar 1 unit akan mempengaruhi peningkatan rasio jumlah sekolah per penduduk sebesar koefisiennya. Selain model 3, model 4 juga menjelaskan tentang pengaruh variabel desentralisasi di bidang pendidikan yang dilihat dari kualitas pendidikan tingkat menengah

ke atas yang diwakili oleh variabel dependent berupa rasio murid dan guru. Di dalam model 4 ini, ditemukan bahwa tidak ada satupun variabel desentralisasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio murid dan guru tingkat SLTA. Hanya saja variabel tenaga kerja yang merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini, memiliki signifikansi pada $\alpha = 1\%$. Ketidak-signifikan variabel desentralisasi pada model ini disinyalir disebabkan oleh karena pemerintah daerah lebih banyak terfokus pada pengembangan pendidikan tingkat dasar (SD) dan pendidikan tingkat menengah pertama (SMP) yang merupakan bagian dari program wajib belajar 9 tahun, sehingga rekrutmen guru SD dan SLTA lebih banyak dibandingkan guru SLTA.

- **Di bidang kesehatan**, ditemukan bahwa variabel desentralisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan rasio jumlah dokter per 1000 penduduk. Namun demikian, untuk model 6 dengan variabel dependent berupa rasio tempat tidur di Rumah Sakit terhadap, terlihat bahwa variabel desentralisasi personil signifikan dan bertanda positif. Ini berarti bahwa apabila terjadi peningkatan rasio PNS daerah terhadap PNS pusat sebesar 1 unit akan mempengaruhi peningkatan rasio jumlah tempat tidur di Rumah Sakit per 1.000.000 penduduk.
- Selanjutnya, terkait dengan saluran (*channel*) dari variabel desentralisasi yang mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat disimpulkan bahwa variabel desentralisasi fungsional dan variabel desentralisasi personil merupakan saluran (*channel*) yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun demikian kinerja kedua saluran (*channel*) inipun tetap harus ditingkatkan untuk kedepannya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan beberapa saran yang mengarahkan Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat untuk memaksimalkan peranannya dalam kerangka meningkatkan keberfungsian dari variabel desentralisasi, baik variabel desentralisasi fiskal, fungsional maupun personil. Beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

- Memaksimalkan peranan desentralisasi fiskal dengan mengoptimalkan kinerja instrumen-instrumen *revenue* yang mampu mendorong terjadinya peningkatan penerimaan daerah (*local revenue*), misalnya melalui optimalisasi pajak daerah yang merupakan salah satu komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah.

- Mengoptimalkan peranan desentralisasi fungsional, melalui kebijakan pengalokasian anggaran yang disesuaikan dengan visi dan misi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik.
- Meningkatkan peranan desentralisasi personil melalui upaya-upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2004 - 2011. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Bandung
- Bird, R., dan Vaillancourt, F. (1998). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge University Press, United Kingdom.
- Definitions of Decentralization, FAO, diakses dari <http://www.fao.org/docrep/006/ad697e/ad697e03.htm#TopOfPage>
- Ebel, Robert D dan Seidar Yilmaz. (2002). Concept of Fiscal Desentralization and World Wide Overview. World Bank Institute. Available:<http://www.Worldbank.org>
- Elhiraika, A. B. (2007). Fiscal Decentralization and Public Service Delivery in South Africa. *African Trade Policy Centre, Work in Progress*, No. 58. Didownload dari <http://www.uneca.org/atpc/Work%20in%20progress/58.pdf>.
- Hirawan, Susiyanti. (2007). *Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia*. Pidato pada Pengaugerahan Guru Besar di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 24 Februari 2007.
- Hong, Jun Hyun. (2011). *Does Decentralization Worsen Regional Disparity? The Case of Korea*. Paper yang dipresentasikan pada International Conference on Retrospect and Prospect on Public Affairs of 100th Founding Anniversary of the Republic of China, 27-29 Mei, 2011.
- Jin Jing and Zou, Heng-fu. (2000). Fiscal Decentralization and Economi Growth in China. World Bank Working Paper Series 1452. Available :<http://www.worldbank.org>.
- Lembaga Administrasi Negara. 2008. Manajemen Pemerintah Daerah. Editor: Adi Suryanto

- Oates, William. (1972). *Fiscal Federalism*. New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich.
- Pranab, Bardhan., dan Mookherjee, Dilip. (2005). *Decentralization, Corruption and Government Accountability: An Overview*, For Handbook of Economic Corruption edited by Susan Rose-Ackerman, Edward Elgar.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota.
- Slinko, Irina (2002). The Impact of Fiscal Desentralization on the Budget Revenue Inequality among Municipalities and Growth of Russian Regions. Centre for Economic and Financial Research, Moskow
- Siagian, Altito R. (2010). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat). Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Stiglitz, Joseph. E, Sen, Amartya, and Fitoussi, Jean-Paul (diterjemahkan oleh Arumsari, Mutiara dan Bintang Timur, Fitri). (2011). Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolak Ukur Yang Tepat Untuk Menilai Kemajuan.
- Tasrin, Krismiyati. (2011). Study on the Impact of Decentralization Policy on the Quality of Local Public Services in the Education Sector, Case Study: West Java Province, Indonesia. Kobe University. Tesis.
- Widarjono, Agus. (2005). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis. Ekonisis, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Jogjakarta.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
HASIL ESTIMASI COMMON EFFECT (PLS)

<i>Variabel Dependen</i>	<i>Variabel Independen</i>			<i>Variabel Kontrol</i>		R^2
	Desentralisasi Fiskal	Desentralisasi Fungsional	Desentralisasi Personnel	Investasi	Tenaga Kerja	(Adj. R^2)
<i>PDRB per kapita</i>	51.12054*	17.59245	-3975.563*	129.9628***	71.11486***	0.120099
<i>Panjang Jalan per kapita</i>	0.000158	-0.000124	-0.257653***	-0.000710*	0.001552***	0.307635
<i>Jumlah Gedung Sekolah SLTA</i>	-14.76203	-448.7142**	12526.50	1803.278***	610.6346***	0.094536
<i>Rasio Murid dan Guru tingkat SLTA</i>	0.161725	-0.037405	-0.25.78469	-0.030311	0.289502***	0.004175
<i>Jumlah dokter per 1000 penduduk</i>	0.000567*	-0.000162	-0.155716***	-0.000170	0.001294***	0.146739
<i>Jumlah tempat tidur per 1,000,000 penduduk</i>	-25.22147*	-12.55769*	8700.701***	-27.46956*	12.89189***	0.322758

LAMPIRAN 2
HASIL ESTIMASI FIXED EFFECT

<i>Variabel Dependen</i>	<i>Variabel Independen</i>				<i>Variabel Kontrol</i>		R^2 (Adj. R^2)
	Koefisien	Desentralisasi Fiskal	Desentralisasi Fungsional	Desentralisasi Personnel	Investasi	Tenaga Kerja	
<i>PDRB per kapita</i>	4033.835***	-3.458544	-1.936252	1612.280	29.82069***	21.11355***	0.982458
<i>Panjang Jalan per kapita</i>	-0.008890	-1.44E-05	3.44E-05	0.063108	-5.49E-05	0.000486	0.886199
<i>Jumlah Gedung Sekolah SLTA</i>	-288385.0**	-3.370697	-520.3765**	580396.7**	2304.431***	1754.948**	0.347784
<i>Rasio Murid dan Guru tingkat SLTA</i>	99.13308	-0.055260	-0.057271	-179.0147	-0.194527	-0.232580	0.148431
<i>Jumlah dokter per 1000 penduduk</i>	0.108354**	0.000111	-8.55E-05	0.003531	3.44E-05	-0.000448	0.796001
<i>Jumlah tempat tidur per 1,000,000 penduduk</i>	1868.388	-12.44986	-0.770172	4832.916	-8.093969	1.154147	0.800939

LAMPIRAN 3
HASIL ESTIMASI RANDOM EFFECT

<i>Variabel Dependen</i>	<i>Variabel Independen</i>				<i>Variabel Kontrol</i>		<i>R²</i> (Adj. <i>R²</i>)
	Koefisien	Desentralisasi Fiskal	Desentralisasi Fungsional	Desentralisasi Personnel	Investasi	Tenaga Kerja	
<i>PDRB per kapita</i>	4350,448***	-3.125224	-1.917685	799.3844	30.45513***	20.15609***	0.160517
<i>Panjang Jalan per kapita</i>	0.072193**	4.26E-06	8.50E-06	-0.137906**	-0.000116	0.000290	0.047097
<i>Jumlah Gedung Sekolah SLTA</i>	-65260.80	41.87001	-527.6597**	32323.72	2085.952***	1255.161*	0.112699
<i>Rasio Murid dan Guru tingkat SLTA</i>	62.10996	0.106361	-0.015840	-32.38579	-0.174260	-0.369508	0.020052
<i>Jumlah dokter per 1000 penduduk</i>	0.162822***	0.000141	-9.91E-05	-0.127155***	-3.33e-05	-0.000596*	0.232036
<i>Jumlah tempat tidur per 1,000,000 penduduk</i>	-122.5091	-14.24296	-2.012269	8483.833***	-11.19679	11.55429	0.305114

LAMPIRAN 4**HASIL UJI CHOW, UJI HAUSMAN DAN UJI LM**

<i>Model</i>	<i>Hasil Uji</i>			<i>Kesimpulan</i>
	<i>Chow Test</i>	<i>Hausman Test</i>	<i>LM Test</i>	
<i>Model 1</i>	0.0000 (Fixed Effect)	0.0809 (Random Effect)	0.0000 (Random Effect)	<i>Random Effect</i>
<i>Model 2</i>	0.0000 (Fixed Effect)	0.0063 (Fixed Effect)	0.0000 (Random Effect)	<i>Fixed Effect</i>
<i>Model 3</i>	0.0050 (Fixed Effect)	0.1141 (Random Effect)	0.0008 (Random Effect)	<i>Random Effect</i>
<i>Model 4</i>	0.6703 (PLS/Common Effect)	0.5091 (Random Effect)	0.5098 (PLS/Common Effect)	<i>OLS/Common Effect</i>
<i>Model 5</i>	0.0000 (Fixed Effect)	0.1470 (Random Effect)	0.0000 (Random Effect)	<i>Random Effect</i>
<i>Model 6</i>	0.0000 (Fixed Effect)	0.0025 (Fixed Effect)	0.0000 (Random Effect)	<i>Fixed Effect</i>

Tabel 2.2 Beberapa Pendekatan (*Proxy*) Kebijakan Desentralisasi dan Kesejahteraan Masyarakat pada Beberapa Studi Terdahulu

No.	Studi	Metode	Variable Dependent	Variable Independent	Point-Point Hasil Studi
1.	<i>Fiscal Decentralization and Public Service Delivery in South Africa</i> (Adam B. Elhiraika, 2007)	Panel data dari 9 provinsi dengan periode 1996-2005.	Persentase Pengeluaran Provinsi pada sektor pendidikan dan kesehatan.	GDP per kapita, share PAD (<i>own-source revenue</i>) terhadap total pendapatan, share dana transfer terhadap total pendapatan.	Studi ini menemukan bahwa PAD (<i>own-source revenue</i>) tidak mampu menyebabkan pelayanan publik bekerja secara efisien. Provinsi yang kaya cenderung mengalokasikan PAD (<i>own-source revenue</i>)nya terutama untuk sektor lain diluar sektor pendidikan dan kesehatan.
2.	<i>Does Decentralization worsen regional disparity? The Case of Korea</i> (Jun Hyun Hong, 2011)	Panel data	Regional Disparity: 1. Ekonomi Wilayah dengan indikator tenaga kerja, PDRB per kapita; 2. SOC's dengan indikator: perluasan jalan per kapita, panjang pipa air bersih per kapita;	Variable desentralisasi meliputi: 1. Desentralisasi Fiskal, dengan indikator persentase penerimaan pajak daerah dibagi dengan total penerimaan pajak nasional. 2. Functional Decentralization dengan indikator	<ul style="list-style-type: none"> - Semua dimensi desentralisasi tidak memiliki hubungan positif untuk mengurangi kesenjangan daerah. - Desentralisasi fungsional dan desentralisasi personil lebih positif dengan mengurangi kesenjangan daerah dari desentralisasi fiskal.

No.	Studi	Metode	Variable Dependent	Variable Independent	Point-Point Hasil Studi
			<p>3. SDM, dengan indikator % tenaga kerja yang adalah lulusan SMA ke atas, % tenaga kerja dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi atau lebih tinggi.</p> <p>4. Kesehatan dan Kesejahteraan, dengan indikator jumlah dokter per 1000 penduduk, jumlah fasilitas sosial kesehatan per 1 juta</p>	<p>persentase pengeluaran daerah terhadap total pengeluaran nasional.</p> <p>3. Personnel Decentralization dengan indikator persentase jumlah PNS daerah terhadap total PNS nasional</p>	

No.	Studi	Metode	Variable Dependent	Variable Independent	Point-Point Hasil Studi
			penduduk.		
3.	<i>Study on the Impact of Decentralization Policy on the Quality of Local Public Services in the Education Sector</i> <i>Case Study: West Java Province, Indonesia</i> Thesis, Kobe University, Tasrin, Krismiyati, 2011	Studi ini menggunakan data panel kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 1995-2008	<u>Variabel Dependent:</u> Rasio murid terhadap guru untuk tingkat SD dan SMP	<u>Variabel Independent:</u> Share PAD terhadap total penerimaan daerah, share Revenue Sharing terhadap total penerimaan, share intergovernmental transfer terhadap total penerimaan, budget allocation pada sektor pendidikan terhadap total pengeluaran, dummy variable desentralisasi. <u>Variabel control:</u> GDRP per kapita, populasi, dummy variabel krisis ekonomi	- Studi ini menemukan bahwa kebijakan desentralisasi memiliki efek signifikan pada kualitas pendidikan, khususnya untuk sekolah SD dan SMP melalui saluran pengeluaran (<i>expenditure channel</i>). Ini berarti kebijakan desentralisasi menyebabkan pemerintah daerah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, yang terlihat dari meningkatnya anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan sektor pendidikan. Dan ini telah secara signifikan berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan untuk tingkat SD dan SMP.

No.	Studi	Metode	Variable Dependent	Variable Independent	Point-Point Hasil Studi
4.	Gary M Woller dan Kerk Phillips (1998) Tujuan: Mengetahui hubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi.	Panel Data 23 negara sedang berkembang (kategori IMF) 1974-1991, menggunakan Fixed Effect	Tingkat pertumbuhan per kapita	<ul style="list-style-type: none"> • 4 control variabel: Tingkat GDP per kapita, rasio investasi terhadap GDP, akumulasi model manusia, tingkat pertumbuhan populasi; • Ukuran desentralisasi fiskal: rasio penerimaan pemerintah terhadap penerimaan total pemerintah, rasio penerimaan pemerintah lokal dikurangi subsidi terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat hubungan yang lemah antara tingkat penerimaan desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi.

No.	Studi	Metode	Variable Dependent	Variable Independent	Point-Point Hasil Studi
				<p>penerimaan total pemerintah, rasio pengeluaran pemerintah local terhadap pengeluaran pemerintah, rasio dari pengeluaran lokal terhadap pengeluaran total pemerintah dikurangi pengeluaran sosial dan pertahanan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel kontrol lainnya: jumlah impor dan ekspor terhadap GDP, jumlah total aset dan 	

No.	Studi	Metode	Variable Dependent	Variable Independent	Point-Point Hasil Studi
				tanggung jawab bank asing terhadap GDP, tingkat inflasi didasarkan pada GDP deflator, perubahan inflasi untuk jangka waktu tertentu, indeks tekanan politik, indeks kebebasan sipil, nilai tukar mata uang riil, kredit domestik.	

No.	Studi	Metode	Variable Dependent	Variable Independent	Point-Point Hasil Studi
5.	Jin Jin dan Heng-fu Zou (2000) Menganalisa bagaimana alokasi penerimaan dan pengeluaran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di China	Metode OLS menggunakan data panel 28 provinsi di Cina periode 1980-1992	Pertumbuhan pendapatan propinsi	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan tenaga kerja, pajak, derajat keterbukaan ekonomi, tingkat inflasi, investasi Desentralisasi fiskal diukur melalui desentralisasi penerimaan, desentralisasi pengeluaran dan transfer antar pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal berhubungan dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi (provinsi) dalam 12 tahun terakhir.
6.	Irina Slinko, 2002, Mengetahui dampak desentralisasi terhadap ketimpangan wilayah; Menganalisis pengaruh	Metode OLS menggunakan data pabel 33 kabupaten/kota di Rusia periode 1996-1999	Regional inequality diukur melalui indeks gini dari total revenue, total expenditure, grand total expenditure, own revenue	<ul style="list-style-type: none"> Fiscal decentralization: <ol style="list-style-type: none"> Share local expenditure in total budget expenditure; Share local revenue in total budget 	<ul style="list-style-type: none"> Redistribusi (transfer) mengurangi gap kesejahteraan

No.	Studi	Metode	Variable Dependent	Variable Independent	Point-Point Hasil Studi
	desentralisasi fiskal terhadap wilayah miskin; Menganalisis apakah kinerja perekonomian wilayah miskin mendominasi dampak pertumbuhan wilayah secara keseluruhan			revenue; c) Share intergovernmental transfer in total revenue; d) Rasio fragmentsi	
7.	Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat) Altito R. Siagian FE UNDIP, 2010	Panel data 25 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2004-2008	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan ekonomi: PDRB per kapita Ketimpangan Wilayah: 	<ul style="list-style-type: none"> Desentralisasi Fiskal: share penerimaan daerah terhadap total penerimaan daerah; Pajak Daerah: rasio total pajak masing-masing kabupaten kota terhadap PDRB Tenaga Kerja: 	<ul style="list-style-type: none"> Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan secara statistik sebesar 211.3880 terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada 25 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik sebesar 287.8996 ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

No.	Studi	Metode	Variable Dependent	Variable Independent	Point-Point Hasil Studi
				jumlah angkatan kerja per tahun, per wilayah - Aglomerasi: share PDRB kabupaten kota terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat.	

Sumber: *Summary* Beberapa Literatur, 2012

Setelah lebih dari satu dasawarsa kebijakan desentralisasi yang diterapkan di Indonesia, sangat penting untuk melakukan evaluasi dan penilaian prestasi desentralisasi kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya peningkatan PDRB perkapita, akan tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pengertian yang lebih komprehensif. Buku ini merupakan hasil kajian/penelitian yang bertujuan untuk melihat dampak kebijakan desentralisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.

Krismiati Tasrin. Lahir di Boyolali pada tanggal 25 Mei 1978. Peneliti pada PKP2A I LAN ini menamatkan pendidikan sarjananya di Institut Teknologi Bandung, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota pada tahun 2002 dan memperoleh gelar Master pada bidang Economics Development and Policy dari Kobe University, Jepang pada tahun 2011. Selain aktif menulis di berbagai jurnal nasional, juga aktif dalam memberikan advokasi dan konsultasi pada berbagai instansi pemerintah daerah di Indonesia.



Putri Wulandari. Lahir di Bandung pada tanggal 17 Februari 1982. Peneliti pada PKP2A I LAN ini menamatkan pendidikan sarjananya di Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2004 dan memperoleh gelar Magisternya dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2012 dalam Bidang Studi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Selain, berkecimpung dalam dunia penelitian, juga aktif sebagai dosen pada STIA LAN Bandung.



Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
2012